



Kunci Sukses
Di Abad 21

Mencerahkan Anak Bangsa
di Negeri Jiran

EDISI 12 | TAHUN V | APRIL 2019

GURU DIKDAS

Media Informasi Guru Pendidikan Dasar

WAWANCARA KHUSUS
Dr. Praptono, M.Ed., Direktur PG Dikdas

Karakter Seorang Guru
Harus Futuristik



KEMDIKBUD DAN TNI

**PERKUAT PENDIDIKAN
DI DAERAH 3T**

**RNPK 2019
DIHARAPKAN
MAMPU
TUNTASKAN
PERSOALAN
GURU**



ISSN 2088-1282



9 17720881128235



SURAT PEMBACA

Seluruh anak bangsa yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan di luar negeri wajib mendapatkan pendidikan. Program yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud dengan mengirim para guru untuk mengajar anak-anak Indonesia di Malaysia merupakan langkah yang patut diapresiasi.

Program ini membuktikan pemerintah melalui Kemendikbud terus berupaya mencerdaskan anak-anak bangsa tidak hanya yang berada di wilayah NKRI, tapi juga di luar negeri, yakni Malaysia. Upaya ini harus terus dilakukan dengan mengirim guru-guru yang berkualitas dan memiliki mental juang yang gigih untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia di Malaysia.

(Andi Rahman - Bandung)

Kebijakan Zonasi yang sudah diberlakukan oleh Kemendikbud merupakan kebijakan yang bisa mendorong pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Peralannya ke depan tidak ada lagi sekolah-sekolah favorit, tapi semua sekolah akan memiliki kualitas yang sama. Sehingga tidak ada lagi kasta dalam pendidikan di Indonesia. Semua sekolah memiliki kualitas yang sama.

Maka itu, saya sangat optimis ke depan sekolah-sekolah yang tadinya biasa-biasa saja akan menjadi sekolah yang luar biasa. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pemerintah harus menyebar guru-guru yang berkualitas di semua sekolah secara merata. Tidak boleh terjadi lagi guru-guru yang berkualitas dan berkompeten terpusat hanya di beberapa sekolah saja.

Selain itu, kebijakan zonasi akan mempermudah anak-anak untuk bersekolah. Mereka tidak lagi bingung mencari sekolah favorit. Para siswa bisa mendapatkan sekolah yang berkualitas di dekat tempat tinggal mereka.

(Eli Suryani - Pekalongan)

Seleksi Calon Guru Tahap 10 Untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019 sudah dilakukan. Semoga dari seleksi tersebut mendapatkan guru-guru yang berkompeten. Dan yang paling penting adalah guru yang memiliki motivasi yang kuat dan tahan banting. Sebab, mereka nanti akan mengajar anak-anak Indonesia di Malaysia yang bertempat tinggal di daerah perkebunan.

Mengajar di sana pasti akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang berat. Seperti keterbatasan fasilitas dalam kegiatan belajar mengajar. Semoga dari seleksi tersebut akan terpilih guru-guru yang ikhlas mengabdikan untuk bangsa. Mengabdikan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Keikhlasan inilah yang membuat mereka akan tegar dalam menghadapi permasalahan yang akan dihadapi nanti.

(Isna - Bekasi)

SUSUNAN REDAKSI

PEMBINA

Dr. Supriano, M.Ed
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

PENGARAH

Dr. Praptono, M.Ed
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Esti Widyastuti, SH

SIDANG REDAKSI

Ir. Mamat, M.M
Dr. Elvira, S.H., M.H.
Drs. Palupi Raraswati, M.A.P.
Dra. Edna Betty, M.Phil. SNE.
Eddy Tedjo Prakoso S, S.H., M.M.
Zulfikar Rachman
Michael Malik
Zainal Arifin
Amir Fiqi

KORESPONDEN

Nabila Desyalika Putri (Yogyakarta)
Andi Wahyudi (Surabaya)

DESAIN dan TATA LETAK

Toni Dwi Saputra
Soki Rahman Wardi

SEKRETARIAT

Asep Kiki Marjuki, S.Pd
Didik Biantoro, S.Pd

PENERBIT

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

ALAMAT REDAKSI

Sekretariat Direktorat Pembinaan Guru Dikdas
Gedung D. Lt. 15 Kompleks Kemendikbud
Jl. Pintu I Senayan, Jakarta

“Pendidikan menyiapkan satu generasi untuk mengantisipasi kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini kalau dunia pendidikan kita hanya menyelesaikan masalah untuk hari ini, maka ketika anak-anak lulus, masalah dia sudah berbeda. Karakter seorang guru itu harus futuristik. Dia harus tahu 20 tahun yang akan datang anak-anak itu eranya mau seperti apa. Tugas pendidikan adalah menyiapkan anak-anak agar mampu, kuat dengan dunia dia di 20 tahun yang akan datang.”

Praptono, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar



Salam Redaksi

Guru kita harus menjadi guru yang sangat terbuka. Guru kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, juga bisa memberi solusi terhadap persoalan, terhadap keinginan dari para peserta didiknya. Sekarang kita tidak hanya cukup dengan guru yang pintar, tapi kalau dia tidak bisa bergaul secara baik dengan anak-anak juga tidak akan optimal untuk membantu anak-anak kita. Rekan guru juga diharapkan jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini pergerakannya cepat, perubahan yang terjadi di masyarakat itu harus mampu kita ikuti. Apalagi pendidikan menyiapkan satu generasi untuk mengantisipasi kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini kalau dunia pendidikan kita hanya menyelesaikan masalah untuk hari ini, maka ketika anak-anak lulus, masalah dia sudah berbeda. Demikianlah salah satu intisari pesan dari Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono dalam wawancara yang dilakukan tim redaksi majalah Guru Dikdas.

Majalah Guru Dikdas hadir memberikan sejumlah informasi dan inspirasi. Program kemitraan menjadi laporan utama, yakni kerja sama Kemdikbud dengan TNI AD untuk menghadirkan pendidikan bermutu dan berkualitas di daerah 3T. Ada pun pendidikan dapat melampaui batas geografis suatu negara, seperti diperlihatkan pada Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center), dan Pusat Bimbingan Belajar Humana yang terletak di Malaysia. Bagaimana anak-anak dari pekerja migran Indonesia di negeri Jiran tersebut berhak mendapatkan pendidikan juga.

Majalah Guru Dikdas juga mengulas hal terkait Ujian Nasional yaitu soal higher order thinking skills. Untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB), kebijakan zonasi telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu dan terus diperbaiki pelaksanaannya.

Majalah Guru Dikdas juga mengungkap perlunya guru untuk relevan dengan zamannya. Maka bekal keterampilan berpikir abad 21 coba diasah melalui pelatihan guru ke luar negeri. Di samping itu peran guru juga penting kala terjadi kasus perundungan. Guru diharapkan mampu berlaku bijak dan melakukan pendampingan terhadap korban dan pelaku perundungan.

Kutipan



“Kekerasan terhadap anak itu memang harus kita berantas, tapi sebagai pendidik harus menyelesaikannya sesuai dengan kaidah pendidikan, yaitu membina dan mendidik para siswa.”

Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menanggapi kasus yang menimpa siswi SMP ABZ di Pontianak, 11 April 2019.



“Kita tidak mengganti guru, sekali lagi ini bukan mengganti guru. Kita kasih kompetensi kepada para prajurit agar bisa sama-sama. Niatnya sama, prajurit melindungi bangsa, Kementerian bertugas mencerdaskan bangsa.”

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano tentang kerja sama Kemdikbud dan TNI AD di Batalyon Infanteri 600/Raider, 11 Maret 2019.



“Zonasi adalah pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam rangka untuk menyebar luaskan sekolah-sekolah berwawasan keunggulan. Kita tidak ingin lagi ada istilah sekolah-sekolah favorit karena harus terjadi pemerataan mutu pendidikan.”

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemendikbud, Praptono dalam wawancara di ruang kerjanya, 21 Maret 2019.

DAFTAR ISI



Kunci Sukses di Abad 21 6

Menyiapkan Pembelajaran Abad 21

Kemdikbud dan TNI Perkuat Pendidikan di Daerah 3T 10

Mendikbud: Kerja Sama dengan TNI di Daerah 3T Bukan untuk Gantikan Guru 12

Batalyon Infanteri 600/ Raider di Balikpapan Mencerdaskan Bangsa di Daerah 3T 14

Batalyon Infanteri 303/ Setia Sampai Mati di Garut Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran kepada Personel TNI AD Sejalan dengan Nawacita 20

Meningkatkan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T 22

Mendidiklah dengan Welas Asih dan Cinta 23

Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP 24



Pembekalan Kompetensi untuk Personel TNI AD Berjalan Menyenangkan 27

Kreativitas dalam Mengajar 28

Membuat Peserta Didik Aktif Bergerak 28

Menggunakan Pendekatan Sederhana dan Konkret 29

Terinspirasi Metode Pembelajaran Ki Hadjar Dewantara 31

Pelajaran dari Kerajaan Majapahit yang Runtuh 32

Pelita Pendidikan di Daerah 3T 35



Mencerahkan Anak Bangsa di Negeri Jiran 39

Masih Kekurangan Guru

Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa

Ingin Mengabdikan kepada Nusa dan Bangsa 43

Evaluasi Kinerja bagi Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia 44

Evaluasi Kinerja untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Para Guru 47

Memberikan Solusi 49

Kegiatan Pengembangan Konten Website 50

WAWANCARA KHUSUS 52

Dr. Praptono, M.Ed.
Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Karakter Seorang Guru Harus Futuristik

Tunjangan Profesi Guru Bermuara pada Kualitas Layanan Pendidikan yang Lebih Baik 51

Kebijakan Zonasi dan Penataan Guru 56

Higher Order Thinking Skills Bekal Bersaing di Abad 21 59

Pelatihan Guru ke Luar Negeri Era Revolusi Industri 4.0 63

Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja 64

RNPK 2019 DIHARAPKAN MAMPU TUNTASKAN PERSOALAN GURU 67

KUNCI SUKSES DI ABAD 21

Dr. Supriano, M.Ed.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



Abad 21 tantangan zamannya memerlukan sumber daya manusia (SDM) yang kreatif, inovatif, dan produktif. Untuk menghadapi era tersebut dibutuhkan cara tertentu. SDM Indonesia di abad 21 tidak hanya bersaing di tingkat lokal, nasional, tapi berkompetisi di kancah internasional.

Untuk menghadapi era tersebut, guru dan tenaga kependidikan seyogianya memiliki kemampuan literasi. Kemampuan literasi, apakah literasi membaca, literasi teknologi, literasi budaya, harus dikuasai. Termasuk literasi terkait NKRI, budaya lokal, budaya nasional, dan budaya-budaya luar.

Guru dan tenaga kependidikan juga harus membekali diri dengan karakter yang baik. Pada abad ke-21, karakter seseorang akan mempengaruhi maju-tidaknya, bersaing atau tidaknya, terpengaruh oleh karakter. Para guru dan tenaga pendidik harus mempunyai karakter yang berkaitan dengan religius, percaya kepada Tuhan, dekat kepada Sang Pencipta. Guru dan tenaga pendidik harus mempunyai karakter percaya diri, bisa menahan emosi, bisa menahan hawa nafsu, juga bisa membaca perubahan-perubahan. Termasuk juga bisa gotong royong, mandiri, integritas, kejujuran, ini yang harus dimiliki. Karakter-karakter inilah yang akan

menentukan kesuksesan di abad 21.

Kunci sukses di abad 21 berikutnya yakni hal yang dikenal dengan 4C (creativity, critical thinking, communication, collaboration). Critical thinking, guru dan tenaga pendidik bisa berbicara, kalian bisa berkomunikasi, tetapi kalian punya rasional. Kompetensi itu yang harus dimiliki. Guru dan tenaga pendidik juga harus mempunyai kompetensi kolaborasi, kerja sama. Kalian harus mempunyai kompetensi bertanya. Kalian harus punya kompetensi kreativitas. Kolaborasi, komunikasi, berani bertanya, itu bagian dari kompetensi yang dibutuhkan di abad 21.

Menyiapkan Pembelajaran Abad 21

Indonesia harus mengejar ketertinggalan serta menyiapkan peserta didik untuk zaman mendatang. Pemerintah secara bertahap mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran.

Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.

Soal berbentuk penalaran diperlukan agar anak-anak Indonesia dapat bersaing dengan negara lain. Kita harus dorong guru-guru kita agar banyak terlibat dalam menyusun aplikasi soal dan merakit soal berbentuk penalaran supaya bisa bersaing dengan negara lain.

Para guru juga seyogianya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan terus mengembangkan kompetensi. Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya. Termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya. Hal tersebut tentu tidak akan dapat diwujudkan jika para guru berhenti belajar dan mengembangkan diri.

Akan tetapi, walaupun teknologi informasi berkembang demikian cepat dan sumber-sumber belajar begitu mudah diperoleh, peran guru sebagai pendidik tidak tergantikan oleh kemajuan teknologi tersebut. Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi setiap peserta didik. Oleh sebab itu, profesi guru sangat lekat dengan integritas dan kepribadian; guru tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Tugas guru sebagai pendidik adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk dalam pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak serta sebagai inspirator bagi anak didiknya. Guru hendaknya tidak sekadar menyalahkan dahsyatnya perkembangan teknologi informasi, melainkan mampu mengarahkan potensi positif kemajuan tersebut.



Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, Asisten Teritorial KASAD Mayor Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, dan Brigadir Jenderal TNI Richard Tampubolon sebagai Kasdam VI Mulawarman dibopong oleh para prajurit dari Batalyon Infanteri 600 Raider/Mdg Balikpapan sambil menyanyikan yel-yel setelah melaksanakan Upacara Pembukaan Bimtek TNI AD, Senin (11/3/2019).





KEMDIKBUD DAN TNI PERKUAT PENDIDIKAN DI DAERAH 3T



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan melibatkan sejumlah tentara menjadi pengajar yang bertugas di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T). "Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan guru yang ada di daerah 3T. Banyak sekolah di daerah 3T yang kekurangan guru," ujar Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, usai perjanjian kerja sama dengan TNI AD di Jakarta, Rabu (27/2/2019). Kemendikbud melakukan perjanjian kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat tentang Penugasan Personel TNI AD sebagai pengajar pada satuan pendidikan di daerah 3T.

Dengan disepakatinya perjanjian ini, Kemendikbud akan memberikan pelatihan tentang proses pembelajaran selama 40 jam kepada personel yang bertugas di daerah 3T. Para prajurit akan diberi pelatihan pedagogi pada 10 hingga 15 Maret 2019. Dengan demikian, para prajurit TNI AD tersebut dapat ikut menjadi pendidik di daerah-daerah yang kekurangan guru. Ruang lingkup kerja sama itu adalah penguatan kompetensi dalam penguatan kompetensi dalam proses

pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T, program penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik, pemantau dan evaluasi.

"Yang akan kita berikan adalah pendidikan pedagoginya. Jadi, bagaimana cara mengajar, bagaimana mengajar yang menyenangkan. Kan TNI ini serius ya, tapi kalau menghadapi anak-anak ini kan harus tidak emosional," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Supriano, di Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Dia mengatakan akan melakukan kegiatan penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada 900 orang, yang terdiri dari 450 orang TNI AD dari Batalyon Infanteri 600/Raider yang akan bertugas di Nunukan dan 450 orang TNI AD dari Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati yang akan bertugas di Malinau.

Kemampuan utama yang diajarkan terkait dengan pendidikan karakter; bela negara; membaca menulis, dan berhitung; kecakapan hidup; dan kepanduan.



Dirjen GTK Kemendikbud Supriano dan Asisten Teritorial Kasad Mayor Jenderal TNI Bakti Agus Fadjari, beserta para narasumber dan juga para peserta berfoto bersama di lapangan Yonif 600 Raider/Mdg Balikpapan, Senin (11/3/2019).

“Jadi kita ajarkan bagaimana pedagoginya, karena sebagian besar adalah lulusan SMA. Tujuannya agar bisa menciptakan kelas yang menyenangkan,” tambah Supriano. Menurut dia, para tentara tersebut akan masuk ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru. Misalnya jika kekurangan guru olahraga, maka tentara bisa mengajar di situ.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi Kemendikbud dan TNI untuk mencerdaskan anak bangsa,” katanya. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan Dirjen GTK Kemendikbud, Supriano, dan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari.



Kemdikbud dan TNI AD menjalin kerja sama untuk membantu belajar mengajar di daerah 3T. Nota Kerja sama ditandatangani oleh Dirjen GTK Kemendikbud Supriano dan Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemdikbud, Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019.

Mendikbud Muhadjir Effendy kala melakukan peresmian Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri Ok Aon di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada tanggal 6 Desember 2017.



Mendikbud: Kerja Sama dengan TNI di Daerah 3T Bukan untuk Gantikan Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa kerja sama yang dijalin dengan TNI dalam menempatkan personelnnya untuk mengajar di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T), bukan untuk menggantikan peran dan posisi seorang guru.

“TNI tetap sebagai TNI, bukan untuk menjadi guru dan menggantikan peran serta posisi seorang guru. Mereka hanya membantu tugas guru-guru di daerah 3T dan wilayah yang

kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian, kebutuhan tenaga pengajar di daerah 3T akan terbantu oleh para prajurit yang ditempatkan di wilayah 3T,” kata Mendikbud.

Selama ini, lanjut mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu, banyak prajurit TNI yang memang sudah melaksanakan peran itu (membantu guru) di wilayah terpencil. “Para prajurit di wilayah terpencil, khususnya di daerah 3T tugas itu, tetapi belum ada koordinasi yang baik.”

Dengan adanya penandatanganan

nota kesepahaman (MoU) yang dilaksanakan pada Rabu (27/2/2019), para prajurit TNI tersebut bakal dibekali dengan keterampilan mengajar, materi ajar, pengetahuan tentang keguruan dan metode-metode mengajar sesuai kebutuhan agar bantuan mengajar para prajurit TNI ini lebih terarah dan optimal.

“Oleh karena itu, tidak benar kalau keberadaan TNI, khususnya di daerah 3T ini akan menggantikan peran guru. Para prajurit TNI ini hanya membantu karena di wilayah 3T masih kekurangan tenaga pengajar,” ucap Mendikbud.

BIMBINGAN TEKNIS PENGUATAN KOMPETENSI DALAM PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS KEPADA PERSONEL TNI AD PADA SATUAN PENDIDIKAN DI DAERAH TERLUAR, TERTINGGAL, DAN TERDEPAN (3T)

DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 11 S.D. 14 MARET 2019
KERJA SAMA KEMDIKBUD DENGAN TNI AD

Bimbingan teknis dilaksanakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Batalyon Infanteri 600/Raider di Balikpapan dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut

Batalyon Infanteri 600/Raider akan bertugas di Nunukan dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati akan bertugas di Malinau.

Total jumlah peserta 900 orang personel TNI AD

Dibekali 5 kemampuan yaitu penguatan pendidikan karakter (PPK); bela negara; membaca, menulis, dan berhitung (calistung); kecakapan hidup; dan kependuan

Narasumber dalam bimbingan teknis ini yakni widyaiswara dan dosen-dosen yang berpengalaman dan terlatih di bidangnya, dengan pola bimtek 40 jam

BIMTEK
TNI AD
MENGAJAR

Menyinggung kemungkinan adanya tumpang tindih kebijakan dengan program SM3T bagi mahasiswa calon guru, Muhadjir dengan tegas mengatakan tidak.

“Sekali lagi saya tegaskan, para prajurit TNI itu hanya membantu dan posisi guru tetap sebagai seorang guru, tetapi di daerah yang kekurangan tenaga pengajar (guru) dibantu oleh TNI agar proses belajar mengajar tetap berjalan lancar,” paparnya.

Kemendikbud menjalin kerja sama dengan TNI AD untuk membantu proses belajar mengajar di daerah 3T. Nota kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK)

Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjar di kantor Kemendikbud di Jakarta (27/2/2019).

Melalui kerja sama ini, diharapkan personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian, kebutuhan guru akan terbantu oleh para prajurit tersebut.

Sinergi dengan TNI AD adalah bentuk antisipasi Ditjen GTK jika ada sekolah yang kekurangan guru, sehingga bisa tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan diisi oleh anggota TNI yang bertugas di daerah tersebut.

Ada 900 personel yang disiapkan sebagai antisipasi jika di perbatasan itu tidak ada guru. Dalam MoU tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malinau akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

Rencananya ada dua batalyon yang diberikan pembekalan oleh GTK sebelum bertugas. Kedua batalyon tersebut adalah Yonif Raider 303/ Setia Sampai Mati di Garut dan Yonif 600/Raider di Balikpapan yang akan mendapatkan pembekalan selama 40 jam sebelum bertugas.

BATALYON INFANTERI 600/RAIDER DI BALIKPAPAN

Mencerdaskan Bangsa di Daerah 3T

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjalin kerja sama dengan TNI AD untuk membantu proses belajar mengajar di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T). Nota kerja sama ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjar di kantor Kemendikbud Jakarta pada tanggal 27 Februari 2019.

Kemendikbud melalui Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK mengadakan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD Pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan yang dilaksanakan di Yonif 600/ Raider di Balikpapan dan Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di

Garut. Bimbingan teknis tersebut berlangsung pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019 di masing-masing Batalyon Infanteri.

Pada pembukaan bimtek di Batalyon Infanteri 600/Raider di Balikpapan, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Supriano mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi salah satu solusi nyata dalam mengatasi kekurangan guru di daerah 3T.

“Para prajurit akan diberi pelatihan pedagogi sehingga mereka bisa ikut serta menjadi pendidik di daerah yang kekurangan guru. Ini merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekurangan tersebut. Dikarenakan banyak sekolah di daerah 3T masih terkendala dengan kurangnya tenaga pendidik,” ujarnya di Balikpapan, Senin (11/3/2019).

Bisa dibilang bahwa TNI sudah tidak asing lagi dengan dunia pendidikan. Hal ini karena salah satu tugasnya adalah mendidik masyarakat. Terkait dengan program ini, ada penekanan bahwa sebenarnya para prajurit ini akan menjadi pengisi guru selama di daerah 3T jika memang tidak ada tenaga guru.

“TNI sudah masuk ke pendidikan, itu sudah secara otomatis karena tugasnya adalah mendidik masyarakat. Pembekalan teknis ini berguna bagi para prajurit apabila nanti di daerah 3T tidak ada guru, justru mereka inilah yang berada di garda depan menjadi pengisi selama guru tidak ada. Tidak semua pelajaran juga, misalnya olahraga, pendidikan karakter, calistung dan sebagainya,” imbuhnya.

Sesuatu yang selalu ditekankan tidak hanya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Republik Indonesia Muhadjir Effendy, tetapi juga oleh Dirjen GTK Supriano. Ia mengungkapkan bahwa ini tidak mengganti peran guru tetapi berjalan bersama untuk mencerdaskan serta melindungi bangsa.

“Kita tidak mengganti guru, sekali lagi ini bukan mengganti guru. Kita kasih kompetensi kepada para prajurit agar bisa sama-sama. Niatnya sama, prajurit melindungi bangsa, Kementerian bertugas mencerdaskan bangsa,” tambahnya. Senada dengan Dirjen GTK Supriano, Aster Kasad Mayjend TNI Bakti Agus Fadjar mengapresiasi serta menjelaskan bahwa pembekalan materi kepada para prajurit ini bukan untuk mengganti guru tetapi untuk mengisi kekosongan tenaga guru yang berada di daerah 3T.

“Kami dari Angkatan Darat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Ditjen GTK yang mau memberikan kompetensi tentang kemampuan mengajar kepada para prajurit. Selama ini memang para prajurit yang berada di pos-pos daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) yang menutup kekosongan guru yang ada,” ujarnya.

Besar harapan bahwa para prajurit

ini mampu mengisi kekosongan yang ada dan mampu mentransfer ilmu yang mereka dapat dari pembekalan ini kepada para murid yang berada di pos-pos tersebut. “Harapannya para prajurit bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, bekal yang ada bisa diterapkan di sekolah-sekolah bisa ditransfer kepada murid-murid,” tutupnya.

Bimtek ini mengaplikasikan jam pengajaran 36-40 jam. Dengan jumlah jam pelajaran tersebut dinilai sudah lebih dari cukup. Hal ini pun disepakati oleh Suparman, salah satu narasumber atau pengajar dalam bimtek ini di mata pelajaran kependuan.

“Bimtek ini sudah memenuhi pola 36-40 jam belajar. Tidak hanya di kependuan saja tetapi di mata pelajaran lain yang diajarkan. Terlebih para peserta pun menerima buku panduan serta modul-modul penunjang kegiatan ini yang bisa mereka jadikan acuan ke depannya setelah mereka menerima tugas di perbatasan. Jadi apa yang diajarkan pada bimbingan teknis ini tidak luntur begitu saja,” ucap Suparman.

Hal senada juga disampaikan oleh Asep Saefudin, salah satu narasumber kegiatan pada bidang kompetensi calistung. Ia mengatakan bahwa prajurit

yang sifatnya bukan sebagai guru murni dengan jumlah 40 jam pembelajaran itu sudah baik.

“Untuk membekali mereka ke lapangan, karena sifatnya mereka bukan sebagai guru murni, tetapi sebagai guru pendamping, jumlah tersebut tidak salah juga, sudah baik. Minimal mereka mempunyai dan menguasai pedagogi. Kalau dibilang kurang ya tidak juga, tetapi dengan semangat dan antusias mereka mengikuti ini, saya rasa mereka bisa menguasai segala bentuk bimbingan ini,” tukas dosen mata kuliah pendidikan IPA di UPI Bandung ini.

Kemampuan utama yang diajarkan dalam bimtek ini kepada para prajurit adalah pembinaan karakter; bela negara; membaca, menulis, dan berhitung; kecakapan hidup; dan kependuan.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) menjadi bagian dalam bimbingan teknis yang terselenggara atas kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan TNI AD ini.

Nilai-nilai utama PPK yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas ingin ditanamkan dan diimplementasikan oleh para peserta bimbingan teknis melalui sistem pendidikan nasional agar



diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan masyarakat.

Hal ini menjadi perhatian Nita Suherneti yang menjadi narasumber kompetensi pendidikan karakter dalam bimbingan teknis TNI AD mengajar yang diselenggarakan di Yonif Raider 600/Raider di Balikpapan.

Nita Suherneti berpendapat bahwa pada bimbingan teknis TNI AD Mengajar ini yang terselenggara atas kerja sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan TNI AD, para peserta sudah sangat menguasai nilai-nilai PPK karena latar belakang mereka sebagai seorang prajurit.

“Untuk para peserta ini memang sudah sangat menguasai, contoh kecil dalam hal disiplin, mereka sudah sangat disiplin sekali. Nilai jujur pun tertanam dalam diri mereka, mereka ini jujur apa adanya. Seperti ketika tadi saya mengajar di salah satu kelas, mereka jujur dalam penguasaan

materi. Mengerti ya mereka bilang mengerti, tidak ya mereka akan terus bertanya,” ucap Nita yang dalam kesehariannya beraktivitas di Dinas Pendidikan Kota Bandung ini. Bela negara menjadi salah satu santapan para prajurit karena nanti ketika para prajurit sudah terjun ke daerah tugasnya, mereka bisa meyakini dan memantapkan para siswa tentang wawasan kebangsaan Indonesia. Hal yang menjadi perhatian khusus Nina Ratna Suminar, pengajar dalam kompetensi bela negara.

“Dari pengetahuan sikap dan keterampilan yang menyenangkan dalam bimtek ini, kita juga membekali materi bela negara, bagaimana meyakinkan dan memantapkan para siswa tentang wawasan kebangsaan Indonesia sebagai daerah 3T dengan melihat kekayaan alam dan budaya yang pernah ada melalui para prajurit ini,” ujarnya.

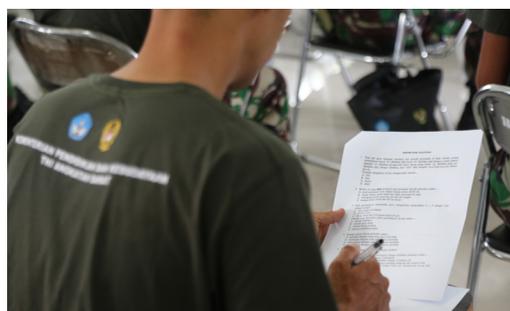
Tantangan yang dihadapi Indonesia sekarang ini adalah bagaimana menangkal proxy war, ancaman yang datang dari luar melalui pihak ketiga. Mengapa proxy war sangat menjadi ancaman besar dan butuh perhatian khusus? Karena proxy war ini menggerogoti generasi milenial Indonesia dengan ideologi-ideologi

baru. Dan melalui pendalaman bela negara ini tentu akan menjadi akar pemahaman bagi para siswa 3T nanti.

“Dan yang paling penting bagaimana menahan proxy war, karena sekarang ancaman bagi Indonesia itu adalah proxy war, ancaman yang datang dari luar dengan menggunakan pihak ketiga, ini menjadi poin yang sangat penting bagi negara dan butuh perhatian khusus,” imbuhnya. “Karena target dari proxy war ini adalah generasi milenial yang notabene sekarang jumlahnya sangat besar, bagaimana kalau akhirnya generasi milenial ini bergeser ideologinya, sehingga materi bela negara ini wajib ada di bimtek TNI AD Mengajar,” tutup Nina yang dalam kesehariannya beraktivitas di LPMP Provinsi DKI Jakarta.

Kompetensi calistung pun tidak luput dari antusiasme para prajurit. Para prajurit memiliki ketertarikan yang luar biasa tinggi terhadap materi yang diajarkan, tidak hanya calistung tetapi juga materi kompetensi lainnya.

Asep Saefudin membagi pengalamannya mengajar para prajurit selepas mengisi materi di Yonif 600/Raider di Balikpapan. Bagaimana para prajurit ini sangat antusias dan tentunya semakin menambah semangat para narasumber untuk lebih semangat



Setelah prosesi pengalungan bunga, Direktur Jenderal GTK dan Aster KASAD TNI disambut dengan yel-yel khas Komando yang dinyanyikan dengan lantang oleh para prajurit Yonif 600 Raider Balikpapan, Senin (11/3/2019).



lagi memberikan materi yang diajarkan.

"Dari segi saya sebagai narasumber, saya sangat takjub, ini di luar ekspektasi saya, saya berpikir mungkin mereka tidak terlalu antusias, tetapi pada kenyataannya mereka sangat-sangat antusias dan itu luar biasa," ujarnya.

"Tentu hal ini sangat bagus, dari perspektif peserta, ini memang hal baru buat mereka. Baru dalam artian bagaimana mengajarkan calistung kepada orang lain. Walaupun kesehariannya mereka sudah sangat menguasai dalam kegiatan berhitung, tetapi bagaimana cara bisa mengajarkan nanti kepada anak-anak SD itu yang membuat mereka penasaran. Rasa penasaran itu yang membuat mereka fokus dan antusias," tambahnya selepas mengisi materi di kelas 6 Bimtek TNI AD Mengajar, Selasa (12/3/2019).

Yang menjadi ketertarikan para prajurit dalam kompetensi calistung ini adalah karena mereka menganggap pola-pola

mengajarkan cara berhitung ternyata mudah.

"Ketertarikan mereka mengikuti ini karena yang selama ini menurut mereka bisa, perkalian penjumlahan serta pengurangan dan lain-lain, tentu di level mereka itu mudah, tetapi ketika saya sampaikan bagaimana kasus per kasus mengenai benda konkrit, itu yang membuat mereka ingin tahu lebih. Mereka berusaha mengupayakan hal itu dengan lingkungan sekitar. Karena kita tahu di daerah 3T belum tentu semua hal bisa terpenuhi," imbuhnya.

Bimtek ini berjalan dengan baik. Pembekalan yang diberikan mampu diimplementasikan para prajurit dalam simulasi mengajar di masing-masing kompetensi.

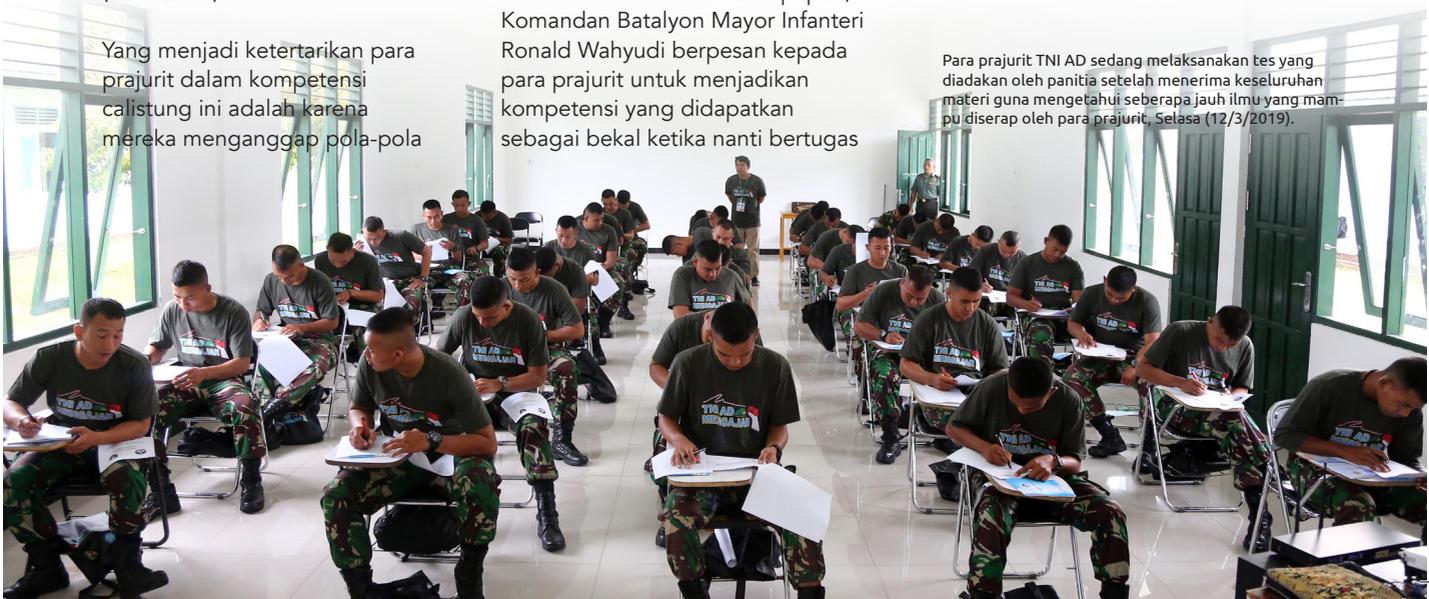
Dalam upacara penutupan yang berlangsung di Aula Batalyon Infanteri 600/Raider di Balikpapan, Komandan Batalyon Mayor Infanteri Ronald Wahyudi berpesan kepada para prajurit untuk menjadikan kompetensi yang didapatkan sebagai bekal ketika nanti bertugas

di daerah perbatasan.

"Kepada seluruh peserta, jadikan kegiatan ini sebagai bekal untuk di daerah 3T nanti. Sehingga TNI AD dapat berpartisipasi dengan nyata memberikan kemajuan di bidang pendidikan. Dengan hal tersebut, diharapkan tujuan bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Terima kasih kepada penyelenggara atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan dan kerja sama ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja," ucapnya.

Melalui Bimtek ini, diharapkan personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pengajar. Dengan demikian, kebutuhan guru akan terbantu oleh para prajurit tersebut.

Para prajurit TNI AD sedang melaksanakan tes yang diadakan oleh panitia setelah menerima keseluruhan materi guna mengetahui seberapa jauh ilmu yang mampu diserap oleh para prajurit, Selasa (12/3/2019).



GALERI





BATALYON INFANTERI RAIDER 303/SETIA SAMPAI MATI DI GARUT

Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran Kepada Personel TNI AD Sejalan dengan Nawacita

Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, M.Q.Wisnu Aji dan Wakil Asisten Teritorial KASAD, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo dibopong oleh para personel TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Senin (11/3/2019).



Pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Bimbingan teknis ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja sama pada tanggal 27 Februari 2019 antara Direktur Jenderal GTK dengan Asisten Teritorial KASAD tentang Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T.

Secara khusus, perjanjian kerja sama ini bukan untuk menjadikan tentara beralih fungsi sebagai guru, namun memberikan bekal bagi prajurit TNI AD yang bertugas di daerah 3T dan sewaktu-waktu bisa membantu pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang sekolahnya kekurangan guru, di samping melaksanakan tugas utama menjaga kedaulatan NKRI.

Bimbingan teknis dilaksanakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Batalyon Infanteri 600/ Raider di Balikpapan dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, dengan jumlah peserta masing-masing lokasi 450 orang, sehingga total peserta sebanyak 900 orang prajurit TNI AD.

Bertempat di Yonif Raider 303/ Setia Sampai Mati pembukaan Bimbingan Teknis, ditandai dengan kedatangan Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr.M.Q.Wisnu Aji, SE, M.Ed. bersama dengan Wakil Asisten Teritorial KASAD, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo, S.lp. Kemeriahan nampak terlihat dalam penyambutan kedatangan. Mulai dari deretan personel TNI AD yang menyambut dengan menenteng senapan, lalu Sesditjen GTK dan Waaster KASAD mendapat pengalungan bunga dari 2 anak kecil berpakaian adat. Nuansa seni pun disuguhkan dengan tari Merak yang dibawakan oleh tiga remaja perempuan. Ditambah lagi dengan korps musik Yonif Raider 303/ Setia Sampai Mati yang semakin

menyemarakkan suasana. Sesditjen GTK dan Waaster KASAD untuk kemudian berjalan beriringan dengan barikade para personel TNI AD yang dengan bersemangat menyanyikan Mars Dharmaputra Kostrad.

Membangun Indonesia dari Pinggiran

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman pada tanggal 4 Desember 2017 antara Mendikbud dengan Panglima TNI tentang Perluasan dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal GTK Kemendikbud melaksanakan program peningkatan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah 3T. Pada tahun 2019, Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama pada tanggal 27 Februari 2019 antara Direktur Jenderal GTK dengan Asisten Teritorial KASAD tentang Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T, untuk memenuhi kebutuhan guru di daerah perbatasan.

Pada pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T yang berlangsung di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Dr.M.Q.Wisnu Aji, SE, M.Ed. memberikan pidato pengarahannya. Ia menyambut baik program ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional

yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Program ini juga sejalan dengan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tujuan dari bimbingan teknis ini untuk memberikan penguatan kompetensi dan pembekalan bagi personel TNI AD yang akan mengajar di daerah 3T,” kata Sesditjen GTK, Wisnu Aji di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Senin (11/3/2019).

“Para personel TNI AD akan dibekali 5 kemampuan yaitu penguatan pendidikan karakter; bela negara; membaca, menulis, dan berhitung; kecakapan hidup; dan kependuan,” imbuh Wisnu Aji.

Ada pun sebagai narasumber dalam bimbingan teknis ini yakni widyaiswara dan dosen-dosen yang

berpengalaman dan terlatih di bidangnya, dengan pola bimtek 40 jam.

“Bagi para peserta, selamat mengikuti Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi ini, laksanakan dengan penuh pengabdian, selalu bersemangat, senantiasa berdoa sebelum bekerja agar transformasi pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi anak negeri di mana pun berada,” jelas Sesditjen GTK, Wisnu Aji.

“Cintai tugas saudara-saudara sebagai bagian dari pengabdian saudara terhadap pembangunan bangsa yang lebih baik demi masa depan yang gemilang,” tutup Wisnu Aji.

Sesditjen GTK dan Waaster KASAD mendapat pengalungan bunga dari 2 anak kecil berpakaian militer.



Meningkatkan Mutu Pendidikan di Wilayah 3T

Menindaklanjuti Nota Kesepahaman Nomor 36/XII/NK/2017 dan Nomor Kerma/45/XII/2017 tentang Perluasan dan Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 4 Desember 2017 antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Panglima TNI, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud

melaksanakan program peningkatan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T). Pada tahun 2019, Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor 03/II/PKS/2019 tanggal 27 Februari 2019 dan Nomor Kerma/2/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 antara Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan Asisten Teritorial Kepala Staf

Angkatan Darat tentang Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan. Pendidikan merupakan hal yang penting dan fundamental dalam menyiapkan generasi penerus bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Salah satu tujuan nasional Indonesia yaitu



mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan pengarahan yang dilakukan oleh Wakil Asisten Teritorial KASAD (Waaster KASAD), Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo dalam event Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada

Satuan Pendidikan di Daerah 3T, diungkapkan pentingnya pendidikan di seluruh penjuru negeri. "Pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri memang sangat sulit tercapai khususnya di wilayah 3T. Hal tersebut terjadi karena banyak faktor. Salah satu faktornya

adalah terbatasnya jumlah tenaga pengajar yang berada di daerah tersebut. Menimbang hal tersebut, TNI AD telah bekerja sama dengan Kemendikbud untuk mencoba mencari solusi," kata Waaster KASAD, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo. "Langkah awal dari kerja sama

tersebut adalah memberikan pembekalan kepada personel TNI AD yang bertugas di wilayah perbatasan dalam bentuk bimbingan teknis mengajar. Harapannya personel TNI AD yang akan ditugaskan di daerah-daerah tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengajar di lembaga pendidikan umum seperti SD dan SMP," tambah Gathut Setyo Utomo di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Senin (11/3/2019).

Dalam kesempatan tersebut Waaster KASAD, Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo membacakan naskah pidato dari Asisten Teritorial (Aster) TNI AD, Mayjen Bakti Agus Fadjar. "Saya menyakini kesempatan kegiatan yang dilaksanakan selama empat hari ini merupakan tempat yang tepat bagi personel satgas pamtas untuk belajar dan saling bertukar informasi tentang bagaimana teknis mengajar, mentransfer ilmu kepada siswa

sesuai dengan prosedur yang tepat. Kombinasi antara ilmu kemiliteran yang dimiliki dengan ilmu yang diperoleh dari narasumber dari Kemendikbud akan menambah kepercayaan diri para prajurit sekalian," ungkapnya.

Akhirnya pada para peserta pelatihan, empat pesan diungkapkan yaitu:

"Pertama, ikuti pelatihan ini dengan saksama, dengan penuh rasa tanggung jawab agar kalian betul-betul bisa menyerap ilmu dengan baik, sehingga segala upaya yang kita lakukan ini tidak sia-sia dan tidak hanya sekedar membuang-buang waktu, tenaga, dan dana," ungkap Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo.

"Kedua, pupuk kerja sama yang baik antara sesama peserta pelatihan dengan para pembimbing, pengajar, dan narasumber, sehingga tercipta suatu kondisi dan hubungan timbal balik yang harmonis guna menunjang

kelancaran pelaksanaan pelatihan," imbuhnya.

Gathut Setyo Utomo menambahkan agar ilmu yang didapat terus berkembang.

"Ketiga, pelajari terus menerus ilmu yang diberikan oleh para pembimbing. Tanyakan hal-hal yang dianggap kurang jelas sampai benar-benar paham dan dapat menguasai ilmu tersebut," tuturnya "Keempat, bahan-bahan pelajaran yang diberikan agar dipelajari secara terus menerus, rawat dan simpan untuk suatu saat kalian jadikan referensi," tambahnya.

"Oleh karenanya saya berharap agar pelatihan ini bisa menghasilkan ide, dan pemikiran yang kreatif, inovatif, dan konstruktif sehingga menjadi solusi yang efektif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," terang Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo kepada 450 personel TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut.

Mendidiklah dengan Welas Asih dan Cinta

Usai mengikuti pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T yang berlangsung di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, 450 personel TNI AD mengikuti pengarahan dari Sesditjen GTK dan Waaster KASAD. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Sesditjen GTK), Wisnu Aji mengungkapkan pentingnya pendidikan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Sedangkan Wakil Asisten Teritorial KASAD (Waaster KASAD), Brigjen TNI Gathut Setyo Utomo menjelaskan Indonesia yang begitu kaya secara sumber daya alam dan pentingnya

menjaga persatuan di negeri ini. Setelah arahan tersebut, berlangsunglah sesi Orientasi Kompetensi Pedagogi dengan narasumber Dr.Asep Sudarsyah. Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung ini mengungkap bahwa mendidik dasarnya welas asih, cinta. Ia lalu mengungkap sejumlah keterampilan dasar yang diantaranya bertanya, memberi penguatan, banyak permainan, menjelaskan, membuka pembelajaran, keterampilan memimpin diskusi kecil.

"Dalam hal bertanya, jangan memaksakan anak harus bisa. Lempar saja pertanyaan. Contohnya apa sih hujan? Lakukan pertanyaan dari yang sederhana ke kompleks," terang Asep Sudarsyah di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di

Garut, Senin (11/3/2019).

"Dalam hal menjelaskan, misalnya baris berbaris yang baik, kasih dengan contoh yang konkret.

Mereka akan meniru dari apa yang dijelaskan," ujar Asep Sudarsyah.

"Sedangkan untuk keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil, berikan tema umum yang dapat memancing diskusi. Diskusi bisa dilakukan di dalam atau pun di luar kelas," jelas Asep yang mengajar pendidikan karakter pada Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T yang berlangsung di Batalyon Infanteri (Yonif) Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut.

Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP

U sai sesi Orientasi Kompetensi Pedagogi, narasumber berikutnya Sunarto yang membawakan materi 'Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP'.

Sunarto membuka bidak materinya dengan sebuah kisah ayam dan elang. Ia menceritakan bahwa ada anak ayam yang ingin menjadi elang. Sang anak ayam memiliki harapan besar dan menilai ada begitu banyak persamaan antara ayam dan elang. Namun ibu si ayam tersebut "menjatuhkan" harapan itu dengan mengatakan ayam adalah ayam, elang adalah elang.

Lantas Sunarto menjembatani cerita itu dengan konteks penugasan personel TNI AD.

"Jangan-jangan ada anak elang di lingkungan ayam. Anak-anak kita yang berada di daerah 3T," kata Sunarto di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Senin (11/3/2019). Sunarto pun menambahkan bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara.

Dalam kesempatan tersebut, Sunarto mengungkap perlunya pola pikir yang benar dalam menghadapi kata 'belajar'. Ia memberi contoh kebencian terhadap suatu mata pelajaran bisa jadi karena siswa dimarahi oleh guru. Ketidaksukaan terhadap mata pelajaran tertentu juga bisa muncul karena adanya sosok "guru killer". "Maka kita sedang ngapain hari ini? Bersenang-senang," ungkap Sunarto interaktif kepada para personel TNI AD Yonif

Raider 303/Setia Sampai Mati.

Tak kenal maka tak sayang, Sunarto pun membeberkan karakter anak SD dan SMP. "Anak SD senang bermain, bergerak, senang bekerja dalam kelompok, diberi contoh," beber Sunarto.

Dalam hal bergerak, menurutnya untuk anak SD kelas 1-3 hanya dapat berkonsentrasi dalam 30 menit. Ada pun tentang diberi contoh, hal nyata yang konkret bisa dijadikan pembelajaran. Misalnya 1 apel ditambah 1 apel maka menjadi 2 apel.

Sedangkan untuk anak SMP sejumlah cirinya yakni puber, ambivalensi (galau antara ingin sendiri dan berkelompok),



MEMAHAMI KARAKTER PESERTA DIDIK USIA SD DAN SMP



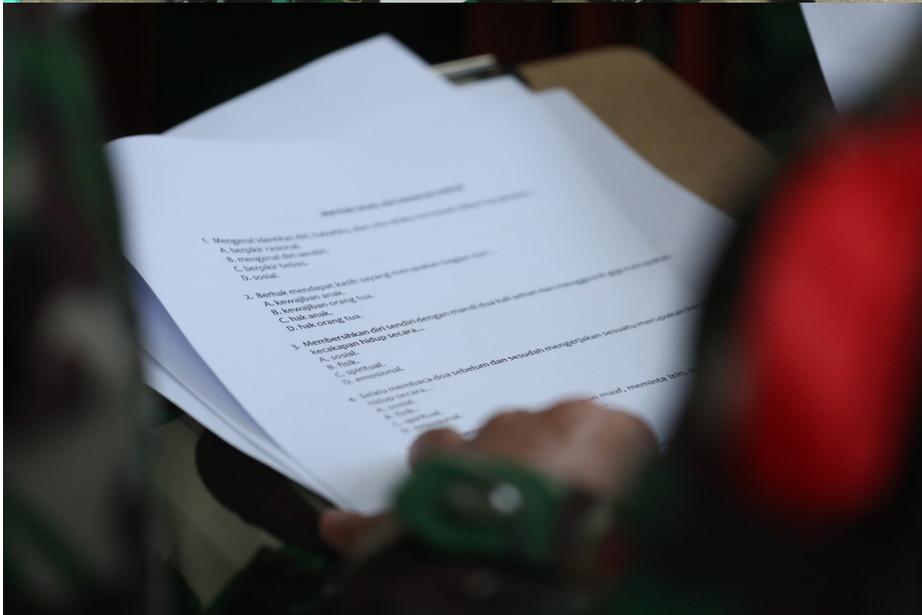
Praktisi pendidikan Sunarto dalam **Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD** pada satuan Pendidikan di Daerah 3T mengungkapkan karakter peserta didik usia SD dan SMP. Apa saja, yuk simak.

SD

- Anak SD senang bermain, bergerak, senang bekerja dalam kelompok, diberi contoh.
- Anak SD kelas 1-3 hanya dapat berkonsentrasi dalam 30 menit.
- Beri contoh berupa hal nyata yang bisa dijadikan pembelajaran. Misalnya 1 apel ditambah 1 apel maka menjadi 2 apel.

SMP

- Puber
- Ambivalensi (galau antara ingin sendiri dan berkelompok).
- Membandingkan dengan norma-kaidah.



membandingkan dengan norma-kaidah, secara skeptis mempertanyakan Tuhan, emosi sangat labil.

Lalu bagaimanakah cara menghadap anak SD dan SMP? Sunarto memberikan sejumlah tips. Menurutnya di fase umur tersebut, mereka menyukai kejutan. Anak usia SD dan SMP suka didengarkan. Maka saran Sunarto kepada personel TNI AD ini adalah dengarkan, dengarkan, dengarkan peserta didik di daerah 3T.

Sunarto juga mewanti-wanti agar para personel TNI AD tidak berteriak kepada peserta didik dalam mendidik. Ia menyarankan agar para tentara ini bisa menjadi motivator bagi peserta didik. Dalam waktu pertemuan beberapa bulan dengan peserta didik di daerah 3T hendaknya menanamkan motivasi.

“Jadilah sumber inspirasi dan penguat jiwa anak didik. Jangan sungkan untuk memuji,” terangnya.

Menurut Sunarto yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung para personel TNI AD ini hendaknya juga memiliki sikap meminta maaf jika salah. Ia juga menyarankan agar para tentara ini memiliki sikap sabar dan bijak. Contoh nyatanya ialah jangan memberikan pertanyaan beruntun. Berikanlah jeda antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, karena anak SD-SMP butuh untuk dihargai manakala mereka menjawab dengan benar.

Para tentara ini juga diharapkan bisa menjadi teladan. Dengan begitu mereka menjadi inspirasi, role model bagi para peserta didik.

Sesi 'Memahami Karakter Peserta Didik Usia SD dan SMP' diakhiri dengan sesi tanya jawab. Timbul pertanyaan bahwa anak generasi sekarang dianggap lembek dan berani melakukan tindakan lancung secara terang benderang. Sunarto pun menganalisa hal tersebut dikarenakan efek globalisasi, Menurutnya generasi Z yang akrab dengan smart phone ini dapat terbawa pengaruh buruk dari teknologi. Selain itu Sunarto juga mengungkap penyebab lainnya yakni anak-anak itu kehilangan momen kasih sayang di rumah dan budaya sekolah.

Pembekalan Kompetensi untuk Personel TNI AD Berjalan Menyenangkan

Pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Bimbingan teknis dilaksanakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Batalyon Infanteri 600/ Raider di Balikpapan dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, dengan jumlah peserta masing-masing lokasi 450 orang, sehingga total peserta sebanyak 900 orang prajurit TNI AD. Para personel TNI AD akan dibekali 5 kemampuan yaitu penguatan pendidikan karakter; bela negara; membaca, menulis, berhitung; kecakapan hidup; dan kepemimpinan.

Pada hari Selasa (12/3/2019) para personel TNI AD di Yonif 600/Raider dan Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati menimba ilmu di kelas untuk mendapatkan bekal penguatan kompetensi. Untuk para tentara di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati dibagi dalam 9 kelas. Mereka mengikuti pelajaran sejak pukul 07.15 sampai dengan 17.45 WIB. Dalam durasi tersebut diiringi oleh 2 kali coffee break dan 1 kali ishoma.

Ada pun sebagai narasumber dalam bimbingan teknis ini yakni widyaiswara dan dosen-dosen yang berpengalaman dan terlatih di bidangnya, dengan pola bimtek 40 jam. Ada narasumber yang berlatar belakang dosen UPI Bandung, LPMP Kepulauan Riau, LPMP DKI Jakarta, Dinas Pendidikan Jakarta, Dinas Pendidikan Kota Bandung, P4TK Bahasa.

Lantas bagaimanakah nuansa pembelajaran di dalam kelas? Suasana akrab dan interaktif terjadi. Diantaranya di kelas yang diisi oleh narasumber Sandi Budi dan Cucun Sutinah di bidang baca, tulis, hitung (calistung). Para TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati terlihat antusias ketika menyanyikan lagu untuk mengenalkan huruf A hingga Z. Sembari bernyanyi diperkenalkan:

A untuk apel

B untuk bebek

...

Dan akhirnya huruf y untuk yoyo

Dan huruf z untuk zebra

Sedangkan di kelas yang diisi oleh narasumber Atang Setiawan di bidang Penguatan Pendidikan Karakter, terdapat nuansa dialogis. Bagaimana personel TNI AD

bertanya tentang penjurusan di sekolah yang dapat mengelompokkan menjadi anak-anak nakal. Pertanyaan lainnya yakni tentang anak yang pendiam. Nuansa dialog antara narasumber dengan para personel TNI AD tersebut terasa cair dan santai.

Belajar Sambil Bermain

Para personel TNI AD di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati mendapatkan pengalaman baru terkait membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Pengalaman itu yakni bagaimana belajar calistung bisa dilakukan sambil bermain. Sehingga momok calistung itu sulit, bisa jadi tereliminir.

Simak saja bagaimana permainan kata yang diajarkan oleh narasumber Ayundha Nabilah. Ia mengajak para tentara untuk bermain menyambung kata. Huruf terakhir dari suatu kata menjadi awal kata. Hal tersebut dilakukan secara estafet. Contohnya: dapur-rumah-hewan.

Para peserta Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T); pun terlihat gembira dengan permainan tersebut. Beberapa personel TNI AD gagal mengutarakan kata. Beberapa ada yang mengulang kata yang telah disebutkan temannya. Permainan juga dilakukan di kelas yang diisi oleh narasumber Dwi Heryanto. Ia memperagakan tangan kanannya diisi oleh 4 permen dan tangan kirinya diisi oleh 3 permen. Lalu satu demi satu permen itu dihitung sehingga berjumlah 7 permen. Hal tersebut merupakan kalimat matematika konkret untuk menjelaskan penjumlahan.

Dalam membaca kalimat, metode SAS ditunjukkan oleh Dwi Heryanto. Metode SAS merupakan salah satu jenis metode yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan bagi siswa pemula. Pengajar dapat memanfaatkan rangsang gambar. Hal itu dilakukan Dwi Heryanto dengan memperlihatkan gambar seorang anak laki-laki yang membawa buku. Para peserta pun diminta untuk menyusun kalimat sederhana. Maka kalimat inilah yang terpilih: Rudi bawa buku. Lalu jika menggunakan metode SAS maka kalimat tersebut diurai sebagai berikut:

Rudi bawa buku

Rudi-bawa-buku

Ru-di ba-wa bu-ku

R-u-d-i b-a-w-a b-u-k-u

Kreativitas dalam Mengajar

Para narasumber dalam Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T), mampu mengemas materi edukasi dengan kreatif. Maka para personel TNI AD di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati terlihat antusias mengikuti sesi demi sesi pembelajaran.

Pada bidang membaca, menulis, dan berhitung (calistung), nuansa humor terdapat kala pembacaan puisi dan tahapan persiapan menulis. Para personel TNI AD diperkenalkan menulis di punggung teman. Cukup 1 huruf saja yang dituliskan, dan sang teman pun menebak huruf apakah itu. Sontak tawa pecah karena beberapa peserta gagal menjawab dengan tepat.

Sedangkan pada pembacaan puisi, jenaka terjadi dikarenakan isi puisi serta adanya pemeraga puisi. 2 peserta dipanggil di sesi ini, satu peserta untuk membacakan puisi Jerawat, peserta lainnya memperagakan kalimat dari puisi tersebut.

Ada pun kreativitas bagi pendidik menurut narasumber Imam Edhi Priyanto dapat tercermin dari kemampuan yang dimiliki. Menurut sosok yang berkiprah di LPMP Kepulauan Riau ini seorang pendidik harus bisa bernyanyi, bercerita, menari. Benar saja kelas-kelas bimbingan teknis begitu semarak dengan nyanyian, cerita, atau pun gerakan badan dari para personel TNI AD yang akan bertugas di Malinau tersebut.

Dalam mengajar, tidak sekadar satu arah saja. Para murid pun dapat membuat kelompok untuk membahas topik tertentu. Di bidang bela negara contohnya, para personel TNI AD tersebut melakukan diskusi

kelompok. Ada kelompok yang membahas Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Samudera Pasai, Jenderal Sudirman dan Pangeran Diponegoro, Bung Hatta dan Imam Bonjol. Masing-masing kelompok melakukan presentasi untuk menguatkan pemahaman sekaligus mempelajari ragam cara pandang.

Sementara itu narasumber Asep Sudarsyah melakukan simulasi mengajar bagi para personel TNI AD tersebut. Simulasi itu dengan memberi kesempatan bagi peserta bimbingan teknis untuk membuka hingga menutup pelajaran. Materi yang dapat dipilih tentang disiplin dan bela negara. Dengan simulasi mengajar ini, maka para tentara yang akan dikirim ke daerah 3T ini akan benar-benar merasakan langsung dinamika mengajar. Mulai dari berbicara, memahami materi pelajaran, trik psikologis, mereka praktikkan secara langsung.

Membuat Peserta Didik Aktif Bergerak

Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T) berlangsung pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019. Bimbingan teknis dilaksanakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Batalyon Infanteri 600/Raider di Balikpapan dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut. Para personel TNI AD tersebut nantinya akan menghadapi siswa SD dan SMP di daerah 3T. Maka mengetahui karakteristik siswa penting adanya.

“Kalian harus melihat karakteristik peserta didik. Anak SD itu senang bermain, bergerak, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta gemar bertanya,” kata narasumber Dwi Heryanto di kelas E Yonif

Raider 303/Setia Sampai Mati, Garut, Kamis pagi (14/3/2019). Maka tak mengherankan materi membaca, menulis, dan berhitung (calistung) diajarkan dengan gembira. Ada nyanyian, ada gerakan aktif dari obyek yang diajar. Simak saja yel TNI Mengajar, lagu Naik Delman yang dipadukan dengan bergerak, ataupun permainan sebut nama. Para siswa di daerah 3T nantinya diharapkan dapat belajar sambil bermain.

Hal yang sama juga dialami di kelas Bela Negara yang diisi oleh narasumber Imam Edhi Priyanto.

“Kalian bisa melakukan hal sederhana. Dengan bergerak anak diharapkan sehat dan bugar. Anak diharapkan bergerak secara teratur dan ritmik,” ujar Imam yang merupakan widyaiswara di LPMP Kepulauan Riau.

Imam juga mengungkap pentingnya membentuk generasi yang sehat dan kuat. Generasi yang loyo dan penyakitan akan membuat negara ini akan rentan untuk diserang. Olahraga juga dapat membakar lemak serta menghindari penyakit. Ia juga mengungkap bahwa kekuatan dapat diupayakan dengan push up serta daya tahan dengan melakukan lari. Sementara itu narasumber Dedi Supriyanto mempunyai trik agar siswa bergerak. Sejumlah ice breaking yang dilakukan secara berkelompok serta melakukan gerakan. Seperti gerakan memijat yang dipadukan dengan nyanyian.

“Metode pelajaran bisa beragam. Agar siswa aktif dan tidak sekadar mendengarkan saja ceramah gurunya,” ungkap Dedi Supriyanto yang merupakan widyaiswara di P4TK Bahasa.

Menggunakan Pendekatan Sederhana dan Konkret



Para personel TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati dan Yonif 600/Raider terus menimba ilmu untuk memperkuat kompetensi. Seperti diketahui pada tanggal 11 s.d. 14 Maret 2019, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Bimbingan teknis dilaksanakan di 2 lokasi secara bersamaan, yakni di Batalyon Infanteri 600/ Raider dan Batalyon Infanteri Raider 303/Setia Sampai Mati, dengan jumlah peserta masing-masing lokasi 450 orang, sehingga total peserta sebanyak 900 orang prajurit TNI AD. 450 orang TNI AD dari Yonif 600/Raider akan bertugas di Nunukan dan 450 orang TNI AD dari Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati

akan bertugas di Malinau. Para personel TNI AD ini nantinya dapat membantu penyelenggaraan pendidikan tingkat SD dan SMP di daerah 3T tersebut.

Para narasumber bimbingan teknis ini mengajarkan agar para personel TNI AD menggunakan pendekatan sederhana dan konkret. Contohnya dalam pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (calistung), benda konkret dapat digunakan dalam pembelajaran. Narasumber Ayundha Nabilah mengajarkan menggunakan benda konkret dalam perkalian. Bisa menggunakan sedotan, lidi, kerikil, daun. Misalnya perkalian 5×2 , dapat diilustrasikan dengan menggunakan sedotan. Sedotan dibagi dalam 5 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 2 sedotan. Untuk kemudian dihitunglah keseluruhan sedotan tersebut.

Hal yang terlihat sederhana juga dapat terlihat dalam pembelajaran. Misalnya

belajar di luar kelas, dimana para personel TNI AD ini membacakan buku kepada siswa. Hal tersebut diutarakan narasumber Asep Sudarsyah.

“Hal-hal yang berada di lingkungan sekitar bisa untuk dijadikan bahan pembelajaran,” kata Asep Sudarsyah di ruang kelas A Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati.

Hal-hal yang terlihat sederhana juga ditunjukkan di bidang kecakapan hidup. Bagaimana para siswa dalam poin membersihkan diri diharapkan dapat menjaga kesehatannya. Hal sederhana seperti mandi 2 kali sehari, membersihkan rambut menggunakan sampo, memotong rambut 1-2 bulan sekali, menggosok gigi sebelum tidur, memotong kuku kaki dan tangan 2 minggu sekali; merupakan ajakan-ajakan sederhana dan konkret untuk hidup secara bersih dan sehat.



Dalam bidang kepanduan para personel TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati diminta membuat tandu.

”



SETIAP ORANG MENJADI GURU,
SETIAP RUMAH MENJADI
SEKOLAH

- Ki Hadjar Dewantara -

TERINSPIRASI METODE PEMBELAJARAN KI HADJAR DEWANTARA

Buah pemikiran dari Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara masih bergaung hingga sekarang. Diantaranya yakni “Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani” yang berarti di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik; di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide; dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Buah pemikiran dari Ki Hadjar Dewantara tersebut mewujudkan dalam ragam metode pengajaran yang dipaparkan pada Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Guru dalam hal ini tidak menjadi pusat dari segala proses pembelajaran. Narasumber Dedi Supriyanto yang mengajar di bidang kecakapan hidup pada bimbingan teknis kepada personel TNI AD, mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang diterapkan bukanlah guru terus menerus pidato selama jam pelajaran. Guru dapat memberikan ragam metode diantaranya diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya.

Apresiasi positif coba dimunculkan oleh para narasumber bidang membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Kalimat positif ‘lihatlah temanku di depan, hebat!’ diajarkan untuk memberi apresiasi kepada mereka yang maju ke depan kelas serta memberi penjelasan atau jawaban yang benar.

Sementara itu narasumber bidang kecakapan hidup, Elita Burhanuddin mengungkapkan dalam pembelajaran di kelas, seorang guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya.

Sedangkan narasumber Penguatan Pendidikan Karakter, Eva Riyanti mengungkap pentingnya memotivasi anak didik.

“Kalian nanti di hadapan peserta didik, hendaknya memiliki karakter yang layak menjadi teladan. Kita isi dengan hal-hal yang bagus,” kata Eva Riyanti di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati di Garut, Selasa (12/3/2019).

Mengajar juga hendaknya dimaknai tak sekadar transfer ilmu, melainkan adanya hubungan humanis antara guru dan murid. “Anak SMP suka didengarkan. Dengarkan, dengarkan, dengarkan. Tatap mata mereka untuk menunjukkan kita benar-benar mendengar dengan saksama,” ujar narasumber Sunarto yang memberikan pengetahuannya tentang cara memahami karakter peserta didik usia SD dan SMP.

Dengan rangkaian contoh di atas maka tepatlah jika dikatakan konsep Ki Hadjar Dewantara yaitu Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani dapat diterima oleh masyarakat.





Kerja sama kelompok dalam proses pembelajaran para personel TNI AD Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati.

Pendidikan di Daerah 3T merupakan upaya untuk menghadirkan pendidikan bagi setiap warga negara. Sesditjen GTK, M.Q. Wisnu Aji menyambut baik program ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Program ini juga sejalan dengan Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ancaman Terhadap NKRI Bisa Datang dari Mana Saja

Indonesia adalah magnet yang memikat bagi banyak negara. Simak saja sejarah penjajahan yang terjadi di negeri ini yang berakar dari kekayaan alam. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang merupakan deretan negara penjajah yang pernah singgah di Indonesia. Jika ditelusuri langgengnya penjajahan salah satu faktornya dari internal rakyat Indonesia. Bagaimana adu domba, sukar bersatu, menjadi penyebab.

Dalam konteks kekinian, hoaks

merupakan proxy war yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam video yang diputar di kelas C dengan narasumber Imam Edhi Prianto dijelaskan tentang proxy war secara singkat. Proxy war berbeda dengan perang konvensional yang selama ini dikenal. Proxy war tidak menggunakan senjata, persenjataan canggih, melainkan dapat menyusup melalui informasi hoaks yang disebar luaskan. Terlebih lagi dengan media sosial yang telah digunakan secara masif di negeri ini. Maka amplifikasi hoaks dapat semakin bergema. Hoaks menyerang pikiran dan mental. Dengan hoaks maka fragmentasi di masyarakat dapat terjadi. Maka menjadi relevanlah apa yang diungkap oleh proklamator Sukarno

“perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri”.

Narasumber Imam Edhi Prianto juga menyertakan video dari acara Lentera Indonesia. Video tersebut berisikan tentang personel TNI yang ditempatkan di daerah 3T. Dari video tersebut nyataah ancaman terhadap NKRI tak sekadar datang dari luar. Ancaman itu dapat hadir

dari internal Indonesia, diantaranya tingkat perekonomian yang belum menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat, pendidikan di wilayah perbatasan yang masih begitu sederhana.

Widyaiswara LPMP Kepulauan Riau ini menyambut baik kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan TNI AD. Wujud nyata dari kerja sama itu diantaranya Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (3T).

Narasumber Imam Edhi Prianto menyambut baik program bimbingan teknis TNI AD ini sebagai salah satu langkah strategis pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya. Program ini juga sejalan dengan nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).





Pelita Pendidikan di Daerah 3T

Penutupan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kepada Personel TNI AD pada Satuan Pendidikan di Daerah 3T di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati berlangsung akrab dan penuh kesan. 450 personel TNI AD di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti bimbingan teknis yang diampu oleh widyaiswara dan dosen-dosen yang berpengalaman dan terlatih di bidangnya, dengan pola bimtek 40 jam.

Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Ditjen GTK, Ir.Mamat mengapresiasi para tentara yang begitu antusias mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini.

“Kegiatan ini berdasarkan dari MOU antara TNI dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Ditjen GTK dan Mabes Angkatan Darat dengan tujuan untuk membekali para prajurit yang akan bertugas di daerah-daerah 3T. Dengan harapan para personel TNI Angkatan Darat itu dapat mengisi kekosongan guru-guru yang ada di daerah tersebut. Jadi niatnya itu membekali, bukan mengubah tugas utama TNI untuk menjaga teritorial, tetapi membekali kompetensi untuk membantu Kementerian dalam mengatasi kekurangan guru-guru yang ada di daerah 3T,” ujar Mamat.

Sementara itu Asisten Teritorial Kasdivif 1 Kostrad Kolonel Inf Tamimi Hendra Kesuma, S.H., M.AP berharap bimbingan teknis ini dapat membuka wawasan dan pengetahuan para peserta.

Acara penutupan (Kamis, 14 Maret 2019) juga diisi oleh demonstrasi kegiatan mengajar. Jepri Wiliadi Sitompul bertindak sebagai pengajar, sedangkan 6 personel TNI AD lainnya sebagai siswa. Materi yang dibawakan terkait membaca, menulis, dan berhitung [calistung]. Dalam kesempatan tersebut baik pihak Kemdikbud dan TNI AD saling memberikan cenderamata. Dari pihak Kemdikbud memberikan apresiasi kepada 7 peserta bimtek terbaik. Rasa kebersamaan dan kekeluargaan juga begitu hidup ketika 450 tentara tersebut menyanyikan lagu Hymne Guru. Acara penutupan pun diakhiri dengan Asisten Teritorial Kasdivif 1 Kostrad, sejumlah personel TNI AD yang bersalaman dengan Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK, panitia dari Direktorat Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Ditjen GTK, dan narasumber.

Sementara itu sejumlah personel TNI AD di Yonif Raider 303/Setia Sampai Mati mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga melalui pelaksanaan bimbingan teknis ini.

“Di kegiatan Bimtek ini banyak hal yang dapat diambil. Pertama, dalam mengatasi bagaimana mengajar baik di siswa SD, SMP memahami karakter mereka. Bagaimana cara mengatasi dan banyak hal yang dapat kita ambil untuk memberikan materi kepada siswa-siswa yang ada di daerah 3T,” ucap Lutfi Yodi.

“Banyak yang kami telah dapatkan dari tim pengajar kami seperti dasar membaca, menulis, dan menghitung. Terutama membaca, dasar-dasar yang telah dipahami. Bagaimana mengajari dari pada anak SD, berikut SMP, berbagai jenjang kemudian dasar-dasar yang diberikan mereka sangat menarik dan dapat dipedomani yang nantinya kami bawa ke tempat penugasan. Dan menulis, dasar-dasar menulis seperti bagaimana cara memegang pena. Kemudian menghitung, metode tersebut sangat memudahkan nantinya untuk mengajarkan di daerah pedalaman dan daerah perbatasan,” kata Vinsensius Sinaga.

“Kami selaku personel TNI AD selain untuk melaksanakan tugas pengamanan kami juga berharap bisa mendidik anak-anak yang berada di pedalaman, yang jauh dari tempat-tempat besar yang mungkin di tempat besar tenaga pendidik sendiri lebih banyak dan lebih berkompotensi. Maka dari itu kami ingin menggugah kesadaran anak-anak di pedalaman tentang pentingnya arti bela negara,” ujar Jajang Jaya Miharja.





LAPORAN KHUSUS



Mencerahkan Anak Bangsa di Negeri Jiran



Para peserta didik di Community Learning Center, CLC ST.Thomas, Kinabalu, Malaysia

“Ini perhatian pemerintah yang sangat luar biasa. Sebab yang berada di sana ada tanggung jawab kita, mereka adalah warga negara kita. Tidak mungkin membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan yang layak.”

Setiap anak bangsa harus mendapatkan pendidikan. Maka itu, pemerintah hadir dengan mengirim para guru untuk mendidik anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia yang berada di sektor perkebunan yang mengalami kesulitan akses pendidikan.

Semua anak bangsa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara wajib melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara, baik yang tinggal di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maupun di luar negeri.

Upaya tersebut benar-benar dijalankan oleh pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dengan memberikan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Khususnya, bagi anak-anak PMI di Malaysia yang bekerja di sektor perkebunan yang mengalami kesulitan akses pendidikan.

Sejak tahun 2006 Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemdikbud telah mengirim guru-guru yang bertugas untuk mendidik anak-anak PMI dalam jenjang setara dengan Sekolah Dasar, sebagai bagian dari upaya dan kewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa.

Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud secara bertahap sejak tahun 2006 telah mengirim sebanyak 529 pendidik yang bertugas selama 2 tahun. Pendidikan bagi anak-anak PMI di Malaysia dilakukan di Satuan Pendidikan Indonesia, yaitu di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Pusat Kegiatan Belajar (*Community Learning Center*) yang terdiri dari Lembaga Swadaya dan Pusat Belajar Humana.

Tahun 2019 merupakan tahap ke 10 pengiriman guru Indonesia ke Malaysia oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Pada tahun ini Kemdikbud akan mengirim 86 orang guru yang berasal dari guru bukan PNS, yang telah diseleksi di 8 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), yakni Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Negeri Medan (Unimed), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Padang (UNP), Universitas Negeri Manado (Unima) dan Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Pada seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak PMI di Malaysia tahun 2019 sebanyak 18 mata pelajaran yang dibutuhkan dengan kuota 86 orang. Berikut rinciannya, PGSD (18), Pendidikan Agama Islam (6), Bahasa Indonesia (6), Bahasa Inggris (5), PPKN (5), Matematika (5), IPA (5), Fisika (3), Biologi (3), Penjaskes & OR (5), Desain Grafis (3), Seni, Drama, Tari dan Musik (Sendratasik) (3), IPS (4), Geografi (3), Sejarah (3), Antropologi (3), Sosiologi (3), dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (3).



Suasana program Penilaian Evaluasi Kinerja Guru Untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 2 April 2019, bertempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia.

Peserta yang mengikuti seleksi calon guru tahap 10 ini dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbud dari sebanyak 3.525 orang pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 400 orang. Mereka yang dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni tes tertulis dan non tertulis di 8 Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

Masih Kekurangan Guru

Seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019 merupakan bagian upaya serius yang dilakukan pemerintah melalui Kemdikbud untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang berada di luar negeri, khususnya bagi anak-anak PMI di Malaysia yang bekerja di sektor perkebunan yang mengalami kesulitan akses pendidikan.

Melihat jumlah guru yang ada disana masih terbilang kurang. Maka, itu Kemdikbud secara bertahap mengirim guru ke sana. Pada tahun 2019 akan mengirim 86 orang untuk mengabdikan dirinya dalam mencerdaskan anak-anak bangsa di Malaysia. Seperti disampaikan Direktur Pembinaan Guru Dikdas, Dr. Praptono, M.Ed. pada tahun 2018 jumlah guru yang masih bertugas di Malaysia sebanyak 290 orang. Namun, sebagian akan mengakhiri masa tugasnya pada Oktober 2019. Maka itu, rekrutmen guru baru sangat perlu dilakukan, sebab jumlah anak PMI yang belum mendapatkan layanan pendidikan masih banyak.

“Guru yang akan dikirim jumlahnya 86 orang. Mereka akan bertugas selama 2 tahun,” ujarnya.

Tentunya guru-guru yang akan dikirim ke sana merupakan guru-guru pilihan yang memiliki kemampuan mumpuni dan memiliki daya juang tinggi dalam upaya mencerdaskan anak bangsa di Malaysia. Maka itu, Praptono menambahkan rekrutmen terhadap para calon guru dilakukan secara ketat dengan melalui beberapa tahap.

Praptono menjelaskan dalam pelaksanaan seleksi pihaknya bekerja sama dengan Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Kemendikbud dan 8 Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK), yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Makassar.

Lebih lanjut dia mengatakan pelaksanaan seleksi guru tahap 10 tersebut dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2019 secara serentak dilaksanakan 8 LPTK.

“Sebanyak 3.525 orang yang mendaftar. Namun yang lulus seleksi administrasi dan akan mengikuti seleksi tahap berikutnya di masing-masing LPTK sebanyak 400 orang,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Guru Sekolah Dasar Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Nani



Pendidikan bagi anak-anak Indonesia di Malaysia dilakukan di Satuan Pendidikan Indonesia, yaitu di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK) dan Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) yang terdiri dari Lembaga Swadaya dan Pusat Belajar Humana.

Dahniarni mengatakan seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019 diharapkan akan menghasilkan pendidik yang berkompeten.

“Peserta yang mendaftar 3.525 orang. Tapi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 400 orang. Dan UPI lah yang paling banyak yang lolos, yakni 90 orang,” jelasnya saat menyampaikan sambutan pada pembukaan seleksi tahap 10 di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (28/3/2019).

Di hadapan peserta seleksi, dia mengingatkan bagi peserta yang dinyatakan lulus nanti harus memiliki semangat yang tangguh dan kuat. Sebab, perjuangan berat untuk mencerdaskan anak bangsa sedang menanti mereka.

“Nanti yang lulus akan menjadi guru di Sabah dan Serawak. Yang harus ibu atau bapak ketahui nanti disana tidak mengajar di kota besar. Tapi nanti ibu atau bapak akan mengajar di Community Learning Center (CLC) yang ada di Sabah dan Serawak. Di sana anak-anak PMI berada. Mereka ada di ladang-ladang sawit, bukan di tempat yang enak,” jelasnya.

Maka itu, pemerintah sangat berharap bagi peserta yang lulus nanti, harus benar-benar memiliki semangat yang kuat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang sulit mendapatkan akses pendidikan. Di sana negara harus hadir agar mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak bangsa yang lain.

“Kami berharap ibu atau bapak menjadi duta bangsa yang mampu mencerdaskan anak-anak bangsa di sana. Sehingga mereka juga bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak bangsa yang lain,” tutupnya.

Upaya Mencerdaskan Anak Bangsa

Tujuan dibentuknya Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka itu, upaya mencerdaskan anak-anak bangsa baik yang ada di wilayah NKRI maupun di luar negeri harus terus dilakukan. Pasalnya seluruh anak bangsa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Dr. Solehuddin mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pelaksanaan seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019. Ini merupakan bukti nyata yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam upaya mencerdaskan seluruh anak bangsa yang berada di luar negeri.

“Ini perhatian pemerintah yang sangat luar biasa. Sebab yang berada di sana ada tanggung jawab kita, mereka adalah warga negara kita. Tidak mungkin membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan yang layak,” ujarnya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (28/3/2019).



Pusat Kegiatan Belajar (Community Learning Center) yang terdiri dari Lembaga Swadaya dan Pusat Belajar Humana.

Melalui seleksi ini diharapkan akan mendapatkan guru-guru yang terbaik dan siap mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa, dalam rangka mencerdaskan anak bangsa yang berada di Malaysia.

“Terbaik baik dari segi kemampuan dan semangat untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa. Karena kita tahu bahwa mereka tidak ditempatkan di pusat-pusat perkotaan, tapi di lingkungan perkebunan,” ujarnya.

Melihat lingkungan mengajar yang seperti itu, maka tidak hanya cukup dengan kemampuan atau kompetensi saja. Semangat juang yang tangguh juga sangat dibutuhkan. Sebab, medan pengabdian yang akan mereka jalani terbilang berat. Yakni di perkebunan sawit yang jauh dari kota besar.

Maka itu, dia berpesan kepada seluruh peserta yang lulus nanti, untuk memiliki spirit yang kuat dalam mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan anak bangsa. Jangan melihat dari segi finansial saja, tapi benar-benar tulus untuk mengabdikan diri untuk nusa dan bangsa.

“Mohon jangan melihat secara finansial, insya Allah mereka akan mendapat yang lebih seperti yang diterima di sini. Tapi pesan saya mereka harus melihat dari sisi yang lebih luas karena mereka ditugaskan tidak hanya mengajar tapi mengabdikan seluruh kehidupannya untuk membangun kehidupan masyarakat di sana,” ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua tim seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019 di Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Toto Rohimat berharap peserta yang mengikuti seleksi ini bisa mengikuti tes ini dengan lancar. Dan peserta yang lulus nanti bisa menjadi pendidik yang siap mengabdikan untuk nusa dan bangsa dalam upaya mencerdaskan anak-anak bangsa yang ada di Malaysia.

“Kami sangat berharap guru-guru yang lulus nanti benar-benar menjadi guru yang siap mengabdikan di sana. Sebab, di sana kondisinya sangat jauh berbeda seperti di sekolah yang mereka biasa mengajar. Sehingga

diperlukan guru-guru yang kuat dan tahan banting. Nanti di sana harus siap mengajar dalam situasi sulit karena mereka akan mengajar daerah terpencil dan perkebunan,” jelasnya.

Selain itu, dia berharap mereka tidak hanya mengajar. Tapi guru-guru yang lolos seleksi nanti bisa menjadi inspirasi dan memberikan contoh kepada siswa dan orang tua di sana. Sehingga mereka semakin sadar dengan dunia pendidikan.

“Guru-guru yang lulus nanti harus menjadi contoh untuk masyarakat di sana. Contoh bagi orang tua dan bisa mendidik anak-anak,” ujarnya.

Lebih lanjut Toto menuturkan materi tes yang diberikan pada seleksi sangat berbobot, sehingga peserta yang lulus nanti benar-benar sosok guru yang siap mengabdikan dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

Dia mengatakan tes yang diberikan pada seleksi ini ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah tes tertulis yang terdiri dari psikotes dan tes mata pelajaran/bidang studi. Pada bagian kedua adalah tes wawancara. Dan tes bagian ketiga adalah Leaderless Group Discussion (LGD).

“Ketiga bagian tes ini sangat penting. Selain peserta memiliki kemampuan mengajar yang bagus, tapi peserta juga akan dilihat seberapa besar keinginan mereka dalam mengajar di daerah-daerah yang jauh dengan perkotaan. Dan dalam tes ini akan terlihat peserta yang memiliki kemampuan dalam memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Ini sangat penting, mereka di sana pasti akan mendapatkan masalah-masalah yang harus mereka sikapi dengan bijak dan menghadirkan solusi dari permasalahan tersebut,” jelasnya.



Ingin Mengabdikan Kepada Nusa dan Bangsa

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan rasa cinta kita sebagai bangsa Indonesia. Melalui dunia pendidikan bisa menjadi sarana untuk membuktikan bahwa kita adalah anak bangsa yang ingin memberikan suatu hal yang terbaik sebagai wujud pengabdian kita kepada nusa dan bangsa.

Seperti yang ingin dilakukan oleh para peserta seleksi calon guru tahap 10 untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia tahun 2019. Mereka mengikuti seleksi tersebut tidak hanya mengejar finansial, tapi yang paling terpenting adalah mampu memberikan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.

Seperti disampaikan salah satu peserta seleksi calon guru tahap 10 bidang Seni Drama, Tari, dan Musik (Sendra Tasik), Riza Utari Ayu Pidada ingin menghabiskan hidupnya untuk mengabdikan kepada nusa dan bangsa dalam bidang pendidikan.

Baginya hidup yang hanya satu kali ini harus mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Saat ini yang dia miliki adalah kemampuan mengajar dalam bidang seni, maka itu, dia ingin mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain.

Maka itu, jika nanti lulus seleksi dia berkomitmen akan mengabdikan dirinya untuk anak-anak bangsa yang berada di Malaysia. Serta menumbuhkan rasa cinta anak-anak Indonesia terhadap seni dan budaya Indonesia.

"Hidup hanya sekali. Maka itu saya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak dan masyarakat di sana. Saya bisa mengedukasi anak-anak dan masyarakatnya dalam meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia.

Dan bermanfaat bagi orang di sana," ujarnya usai mengikuti seleksi di UPI, Bandung, Kamis (28/3/2019). Lebih lanjut perempuan lulusan Universitas Negeri Medan (Unimed) jurusan seni tari ini mengatakan bahwa dirinya tidak hanya mengajarkan kesenian saja. Tapi dia ingin memberikan ilmu pengetahuan yang lain.

"Selain mengenalkan seni dan budaya Indonesia. Tapi ada hal-hal lain yang saya ingin lakukan misalnya memberi pelajaran tambahan di bidang matematika dasar bagi siswa SD," ujar guru SMA Alexandria Bekasi, Jawa Barat ini.

Hal yang sama juga disampaikan peserta yang lain, Sudirman sebagai guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ini merasa terpanggil sehingga mengikuti seleksi ini. Menurutnya masih banyak anak-anak Indonesia di luar negeri yang butuh pendidikan. "Saya ikut tes ini ingin mengabdikan kepada Indonesia, masih banyak putra-putri Indonesia di luar Indonesia yang masih butuh pendidikan," ujarnya.

Sudirman mengungkapkan jika dia lolos dalam seleksi ini dia ingin mengenalkan budaya lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain itu, dia juga ingin mengajarkan sejarah bangsa Indonesia kepada anak didiknya.

"Bagi saya ini sangat penting. Mereka tinggal di negara orang saya khawatir nasionalisme mereka berkurang. Maka itu saya ingin membangkitkan nasionalisme dan cinta kepada Indonesia melalui sejarah," ujar guru SMPN 2 Plumbon, Cirebon, Jawa Barat ini.

Lebih lanjut dia juga akan mengajarkan pencak silat kepada peserta didiknya. Menurutnya pencak silat merupakan budaya asli bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan dirawat.

"Semoga saya bisa mencetak atlet-atlet pencak silat di sana," tutup pria lulusan Universitas Negeri Yogyakarta ini.



Evaluasi Kinerja bagi Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk setiap warga negara, baik yang tinggal di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sejak tahun 2006, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengirim sebanyak 911 orang guru bina yang ditugaskan selama 2 tahun untuk memberikan layanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia melalui beberapa tahap pengiriman. Saat ini, guru bina yang bertugas di Malaysia berjumlah 290 orang. Pendidikan bagi anak-anak warga Negara Indonesia di Malaysia dilakukan di Satuan Pendidikan Indonesia, yaitu Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Pusat Kegiatan Belajar (Community

Learning Center), dan Pusat Bimbingan Belajar Humana.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar (PG Dikdas), Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan seleksi guru untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia bertempat di delapan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK).

“Kami baru saja melakukan tes rekrutmen di 8 LPTK yaitu Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Negeri Makassar,” kata Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru

Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud, Mamat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Jumat (29/3/2019).

Ada pun perbaikan dan kesinambungan program guru yang bertugas di Malaysia memerlukan informasi yang dapat digali melalui kegiatan evaluasi. Evaluasi program pengiriman guru untuk pendidikan anak-anak Indonesia di Malaysia merupakan salah satu kegiatan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya meningkatkan kualitas program pelayanan pendidikan untuk anak-anak Indonesia di Malaysia.

Evaluasi kinerja diberlakukan bagi guru bina tahap 6, 7, dan 8 yang direkrut pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Jumlah guru bina yang akan dievaluasi pada setiap tahap berturut-turut adalah 28 orang, 46

orang, dan 78 orang guru bina, sehingga jumlah keseluruhan 152 orang guru bina. Evaluasi mencakup kompetensi kepribadian dan sosial. Selain itu, evaluasi juga dilakukan dalam bentuk psikotes dan LGD (leaderless group discussion). Kantor Perwakilan Republik Indonesia juga melakukan evaluasi yang menyangkut kinerja guru dan kontribusinya dalam kegiatan Perwakilan RI.

Evaluasi merupakan bentuk komitmen penyelenggara terhadap akuntabilitas kinerja untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Hasil evaluasi dapat dijadikan indikator keberhasilan atau kegagalan yang kemudian akan dijadikan bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dan tindak lanjut pada masa yang akan datang. Selain itu, hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keberlanjutan penugasan guru bina. Guru bina yang hasil evaluasi kinerjanya baik, akan diberikan reward dalam bentuk perpanjangan masa tugas. Sebaliknya bagi guru bina yang hasil evaluasi kinerjanya dinilai kurang, masa penugasannya tidak diperpanjang. Evaluasi diberlakukan bagi guru bina yang bertugas di CLC dan PB Humana yang ada di Sabah dan Sarawak. Penilaian Evaluasi Kinerja Guru Untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 2 April 2019, bertempat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Malaysia.

“Kami mengapresiasi Sekolah Indonesia Kota Kinabalu yang telah mengorganisir kegiatan ini. Dari mulai persiapan, pelaksanaan,” kata Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan, Direktorat PG Dikdas, Ditjen GTK, Kemdikbud, Palupi Raraswati di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabtu (30/3/2019).

Kala memberi pengarahannya kepada para guru tersebut, Palupi menekankan pentingnya memberikan keteladanan. “Kami pun menitikpkan kepada

bapak, ibu yang masih aktif mengajar bagaimana kita semua harus punya komitmen yang tinggi bagaimana menjadi guru bina, tentunya harus menjadi teladan bagi anak-anak didik kita,” terang Palupi Raraswati.

Ada pun Tim penilai Evaluasi Kinerja Guru Untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, psikolog, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, KRI Tawau, Atase Pendidikan dan Kebudayaan RI KBRI Kuala Lumpur, Kepala Sekolah Indonesia Kota Kinabalu. Penilaian Evaluasi Kinerja bagi Guru untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia Tahap 6, 7, dan 8 adalah upaya dari Direktorat

Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam peningkatan mutu pendidikan yang berada di wilayah Malaysia. Hasil evaluasi diharapkan menghasilkan guru-guru yang layak dan memiliki komitmen tinggi untuk ditempatkan di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu dan sebagai rekomendasi perpanjangan kontrak kerja.

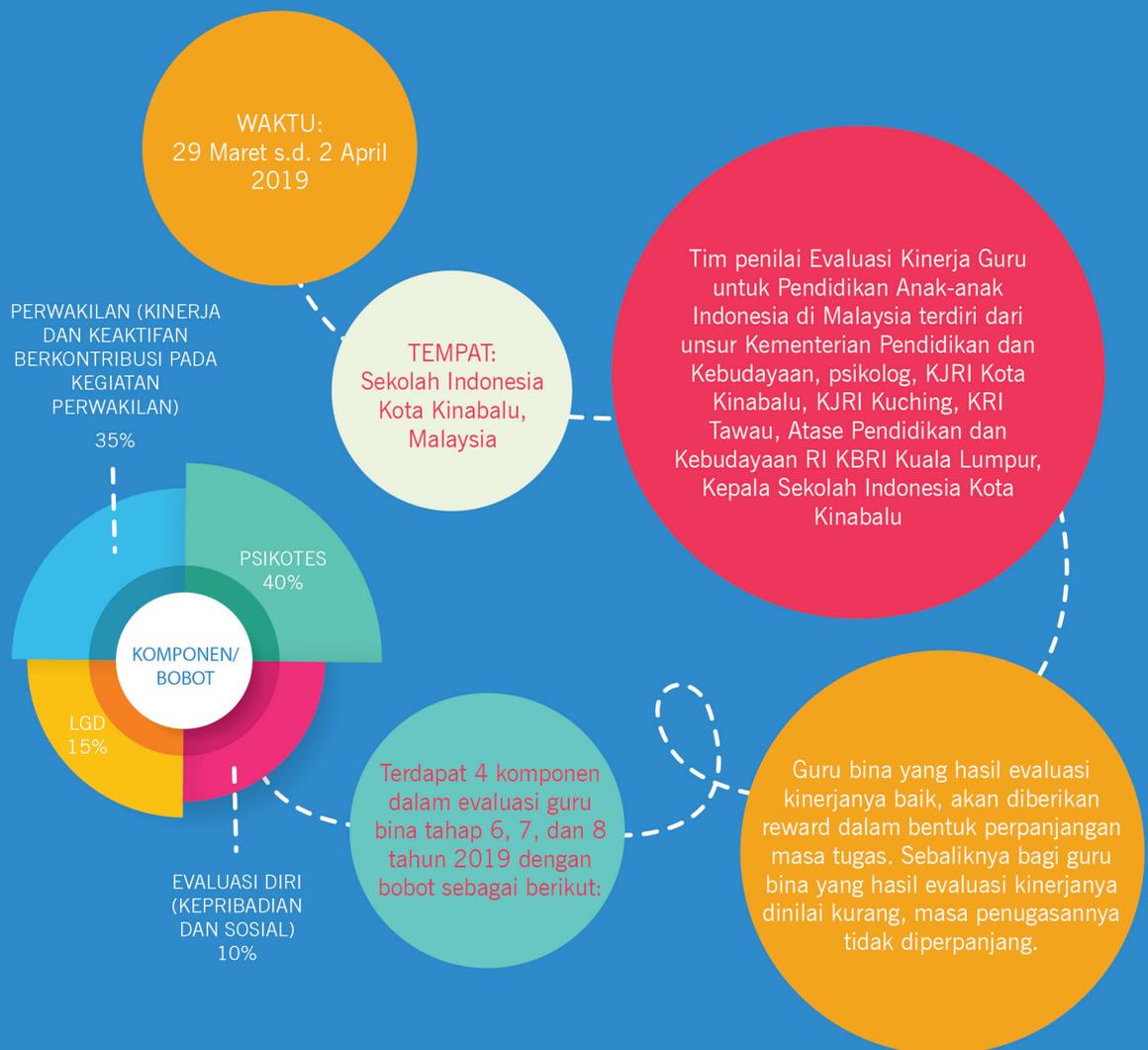
“Harapan kami kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan harapan bisa menyeleksi guru-guru yang ada di sini,” ujar Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud, Mamat.



Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan, Palupi Raraswati (kiri) bersama Kasubdit Program dan Evaluasi Mamat (Kedua dari kiri)

EVALUASI KINERJA

BAGI GURU UNTUK PENDIDIKAN ANAK-ANAK INDONESIA DI MALAYSIA



Evaluasi Kinerja untuk Meningkatkan Profesionalisme dan Kompetensi Para Guru

Evaluasi Kinerja Bagi Guru (tahap 6,7, dan 8) untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia dilakukan untuk mengevaluasi kinerja para guru selama menjalankan tugasnya di sana. Hal ini perlu dilakukan karena masa kontrak mereka akan habis pada bulan Juni 2019 nanti. Hal ini disampaikan Kasubdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud, Ir. Mamat, MM.

“Tujuan dari evaluasi kinerja ini untuk menentukan apakah para guru tahap 6,7, dan 8 bisa diperpanjang atau tidak,” kata Mamat di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Ahad (31/3/2019).

Mamat mengatakan dalam evaluasi kinerja ini pihaknya melibatkan para psikolog. Keterlibatan psikolog ini sangat penting, sehingga bisa melihat secara dalam semangat dan motivasi para guru selama menjalankan tugasnya selama ini.

“Dalam evaluasi ini kami melibatkan psikolog, ini untuk melihat sikap dan motivasi mereka. Seperti daya juang mereka dalam menjalankan tugasnya. Sehingga ke depan upaya mencerdaskan anak-anak bangsa di Malaysia bisa berjalan semakin lebih baik,” tuturnya.

Lebih lanjut menurut Mamat dalam kegiatan evaluasi kinerja ini tidak hanya memberikan materi-materi tes kepada mereka. Pada kesempatan ini mereka



juga mendapatkan pembelajaran terkait Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Menurutnya hal ini perlu diperkuat sehingga para guru yang menjalankan tugas di Malaysia senantiasa melakukan pembelajaran tidak hanya semata-mata memberikan pelajaran, tapi penanaman karakter sejak dini juga mereka berikan.

“Penguatan Pendidikan Karakter juga menjadi materi pada kesempatan ini. Ini sangat penting bagi para guru untuk senantiasa membekali pendidikan karakter kepada anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia,” ujarnya.

Mamat berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar. “Dengan melibatkan banyak pihak semoga evaluasi kinerja ini berjalan sesuai dengan harapan, serta menghasilkan keputusan yang tepat siapa yang

layak untuk dilanjutkan kontraknya, dan tidak dilanjutkan kontraknya,” tutupnya.

Sementara itu Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Ditjen GTK, Kemdikbud, Dra. Palupi Raraswati, M.AP mengatakan evaluasi kinerja ini sangat penting. Melalui kegiatan ini tentunya bisa menjadi pertemuan yang strategis untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan, terutama kebijakan di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

“Bagi saya ini sangat menyenangkan, selama 2 hari ini banyak pengalaman yang didapat setelah bertemu para guru di Kota Kinabalu, Serawak dan Sabah,” kata Palupi Raraswati di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Ahad (31/3/2019).



Krishna Djaelani,
Konsul Jenderal Republik Indonesia Kota
Kinabalu.

Pada kegiatan evaluasi ini para guru tidak hanya dihadapkan dengan materi-materi ujian. Mereka juga mendapatkan wawasan terkait Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis budaya sekolah. Hal ini sangat strategis sehingga para guru bisa memperkuat pendidikan karakter kepada seluruh peserta didiknya.

“Harapan saya para guru mengimplementasikan PPK dalam budaya sekolah. Baik di kelas maupun di luar sekolah,” ujarnya. Dia pun mengajak para guru untuk melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar untuk bersama-sama memperkuat pendidikan karakter bagi para peserta didik. Palsnya untuk mengimplementasikan PPK tidak hanya dijalankan oleh guru itu sendiri, tapi harus melibatkan keluarga dan masyarakat.

“Para guru harus melibatkan orang tua dan masyarakat mengimplementasikan PPK melalui program-program yang ada di CLC. Kami juga mendorong para guru melakukan kolaborasi seluas-luasnya membangun sistem pendidikan. Dan mengajak orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mengimplementasikan PPK. Sehingga di masa depan anak-anak Indonesia di Malaysia menjadi generasi bangsa yang tidak hanya cerdas tapi memiliki budi pekerti luhur,” tutupnya.

Pada kesempatan yang sama Konsul Jenderal Republik Indonesia Kota Kinabalu Krishna Djaelani menyambut baik adanya Evaluasi Kinerja Bagi Guru (tahap



6,7, dan 8) untuk Pendidikan Anak-anak Indonesia di Malaysia yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud. Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi kepada para guru yang sedang menjalankan tugas di Malaysia.

“Ini sangat penting dilakukan. Sebab mereka akan mengajar anak-anak kita yang umumnya sejak lahir dan besar di Malaysia,” kata Krishna Djaelani di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Ahad (31/3/2019).

Dia sangat berharap dengan adanya evaluasi kinerja ini akan

menghasilkan guru-guru yang siap mengabdikan diri secara maksimal dalam rangka mencerdaskan anak-anak Indonesia yang berada di Malaysia. Menurutnya anak-anak Indonesia ini harus mendapat pendidikan yang berkualitas.

Melalui bimbingan para guru yang berkualitas inilah mereka akan mendapatkan pendidikan yang baik. Sehingga meskipun mereka berada di Malaysia, anak-anak Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang baik.

“Kami berhadap dengan evaluasi kinerja ini pendidikan yang diberikan akan lebih baik lagi untuk anak-anak Indonesia,” tutupnya.



Memberikan Solusi

Sementara itu salah satu penilai dari unsur psikolog, Gusmilizar, M.Psi mengapresiasi adanya evaluasi kinerja ini. Menurutnya dengan adanya evaluasi ini ke depan akan menghasilkan para guru-guru yang siap berjuang mencerdaskan anak bangsa yang berada di Malaysia. "Evaluasi kinerja ini bagus. Sehingga kita bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Sehingga ke depan jika mereka diperpanjang kontraknya bisa memperbaiki apa yang menjadi kendala atau permasalahan yang mereka hadapi di lapangan selama ini," jelasnya.

Gusmilizar mengatakan dirinya sebagai psikolog memberikan tes kepada para guru terkait psikotes. Dalam tes ini, tim psikolog menilai para guru dalam

hal kepribadiannya, sosial dan emosionalnya, serta intelegensinya.

Soal intelegensi dia mengatakan menilai para guru soal kecerdasan mereka dan kemampuannya dalam mengatasi permasalahan yang mereka hadapi saat menjalankan tugasnya.

"Tes kinerja juga kita lakukan. Ini tujuannya membangkitkan motivasi dan komitmen mereka dalam menjalankan profesinya sebagai guru," imbuhnya. Lebih lanjut dalam kegiatan evaluasi kinerja ini pihaknya juga melakukan bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini bertujuan untuk memotivasi mereka untuk melayani dan memberikan pengetahuan bagaimana melakukan pendampingan serta dukungan psikologi awal untuk para siswa mereka yang sedang menghadapi masalah psikologis.

"Output dari bimbingan teknis ini diharapkan para guru akan mampu dan bisa menghadapi permasalahan yang sedang mereka hadapi secara psikologis. Dan juga membantu siswa dalam menghadapi masalah psikologis. Seperti masalah bullying yang dihadapi para siswa," jelasnya.

Kegiatan Pengembangan Konten Website



Kasubdit Program dan Evaluasi Mamat sedang memberikan arahan terkait kegiatan pengembangan konten website yang diadakan di Hotel Amarossa Cipete pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2019.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sesuai dengan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru pendidikan dasar, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar telah berhasil membuat serta mengembangkan website resminya yaitu pgdikdas.kemdikbud.go.id.

Untuk mendapatkan portal informasi yang lengkap, akurat dan mudah dijangkau oleh khalayak ramai, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mengadakan Kegiatan Pengembangan Konten Website yang diikuti oleh perwakilan Subdirektorat Program dan Evaluasi; Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Kebijakan; Subdirektorat Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi; Subdirektorat Penilaian Kinerja dan Peningkatan Karier; Subdirektorat Kesejahteraan, Penghargaan, dan Perlindungan; serta Subbagian Tata Usaha yang berada di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar yang berlangsung di Hotel Cosmo Amarossa Jakarta pada tanggal 26 s.d. 28 Maret 2019. Dalam kegiatan ini, para peserta diberi pengetahuan tentang pengelolaan dalam membangun viral communication sebagai saluran alternatif untuk menopang penyebaran informasi secara masif berdasarkan tema serta agenda yang akan dituju.

Strategi dalam digital campaign menjadi perhatian khusus dalam kegiatan ini. Bagaimana Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar memonitor, memetakan serta menganalisis digital terkait dengan isu atau tema yang sedang menjadi tren, sebagai bahan untuk menentukan strategi.

Hasil yang diharapkan tentu tidak main-main. Sesuai dengan arahan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono pada saat kegiatan, Rabu (27/3/2019), agar website ini dapat dijadikan sebagai media informasi bagi masyarakat luas khususnya para guru untuk memperoleh informasi dan perkembangan kebijakan terbaru berkaitan dengan pelaksanaan guru profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, kehadiran media website ini juga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi antarguru dalam menjalankan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, 26 s.d. 28 Maret 2019 berjalan dengan baik dengan menghasilkan kesepakatan bersama di antara subdirektorat yang ada di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar untuk bersama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat luas pada umumnya dan kepada guru-guru pendidikan dasar pada khususnya.

Tunjangan Profesi Guru Bermuara pada Kualitas Layanan Pendidikan yang Lebih Baik

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru bersertifikat melalui pemberian tunjangan profesi dengan layanan penyaluran yang semakin baik. Hal ini karena peran guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional bidang pendidikan.

Pemberian tunjangan profesi itu sendiri sejalan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan pada 2019 menjadi Rp 487,9 Triliun.

Salah satu bentuk tunjangan guru adalah tunjangan profesi guru (TPG) yang mekanisme penyalurannya pada 2019 ini diatur melalui Permendikbud No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Mendikbud Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru

dijelaskan di pasal 15, yaitu meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain, salah satunya adalah tunjangan profesi.

Sebelumnya dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Sebagai tenaga profesional, guru setidaknya harus memiliki prasyarat terdidik dan terlatih (well educated and trained), terstruktur dengan baik (well managed), terlengkapi fasilitasnya (well equipped) dan dibayar dengan layak (well paid). Oleh karena itu pekerjaan seorang guru harus ditunjang oleh prinsip-prinsip memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Tunjangan profesi guru diberikan dalam bentuk uang yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan hidup, sekaligus juga untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya.

kegiatan.

2. Belanja media pendidikan.

Misalnya pembelian laptop, komputer, LCD, dan media lainnya yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan.

3. Belanja penelitian.

Misalnya pembuatan PTK, penelitian ilmiah, makalah dan sebagainya.

4. Belanja peningkatan materi pendidikan.

Misalnya pembelian buku materi, modul, CD materi dan sebagainya.

5. Belanja peningkatan keterampilan guru.

Misalnya kursus komputer atau keahlian lainnya (sebagai sarana menuju sistem pembelajaran berbasis teknologi di era revolusi industri 4.0).

6. Belanja peningkatan mutu pendidikan lain.

Misalnya studi banding, penanganan khusus bagi siswa



Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Tunjangan profesi itu sendiri merupakan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 14 yang menyatakan guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan yang dimaksud tersebut

Ada beberapa contoh belanja profesi yang dapat dilakukan guru menggunakan sebagian dari tunjangan profesi yang diperolehnya yaitu:

1. Belanja peningkatan kualitas profesi.

Misalnya mengikuti seminar, lokakarya, workshop pendidikan yang bukan dibiayai negara minimal satu semester satu kali

“tertinggal” dan lain sebagainya. Semua contoh belanja profesi ini jika dilakukan oleh guru muaranya adalah untuk peningkatan kompetensi guru baik pada sisi kompetensi pedagogi, profesional, sosial maupun kepribadiannya untuk mewujudkan kualitas layanan pendidikan yang lebih baik dan maju di Indonesia.

Dr. Praptono, M.Ed.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Karakter Seorang Guru Harus Futuristik

Tempat dan tanggal lahir:

Kediri, 11 Mei 1969

Pendidikan:

Pendidikan Fisika IKIP Surabaya, Master Bidang Manajemen Pendidikan Internasional The University of Leeds, Doktor Bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta

Karier:

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (2018-Sekarang), Kepala Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (2015-2018), Kepala Subdirektorat Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2013-2015), Kepala Seksi Penilaian dan Akreditasi, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan Dasar (2011-2013)

M

endapatkan amanah sebagai Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sejak 26 September 2018 merupakan tantangan tersendiri bagi Dr. Praptono, M.Ed. Ia menyadari bahwa untuk membangun pendidikan Indonesia memerlukan sinergi berbagai pihak. Senyampang dengan itu Direktorat PG Dikdas melaksanakan sejumlah program kemitraan. Diantaranya terkait dengan upaya menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) melalui kerja sama dengan TNI AD. Kemudian ada program kemitraan guru. Dimana guru-guru yang unggul, guru-guru hebat, dimitirakan dengan guru-guru yang berada di daerah timur, di daerah perbatasan, daerah pinggiran. Mereka belajar bersama didampingi. Dengan program kemitraan ini diharapkan terjadi transfer pengetahuan, transfer pengalaman dari guru-guru hebat kita kepada guru-guru yang ada di wilayah pinggiran.

Kemampuan abad 21 (creativity, critical thinking, collaboration, communication) terus diupayakan bagi guru dan peserta didik. Hal itu juga tercermin dalam soal bertipe higher order thinking skills yang mendapat porsi 10 s.d. 15% pada Ujian Nasional 2019.

“Pendidikan menyiapkan satu generasi untuk mengantisipasi kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini kalau dunia pendidikan kita hanya menyelesaikan masalah untuk hari ini, maka ketika anak-anak lulus, masalah dia sudah berbeda. Karakter seorang guru itu harus futuristik. Dia harus tahu 20 tahun yang akan datang anak-anak itu eranya mau seperti apa. Tugas pendidikan adalah menyiapkan anak-anak agar mampu, kuat dengan dunia dia di 20 tahun yang akan datang,” pesan Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono kala diwawancara di ruang kerjanya, Kamis (21/3/2019).

Untuk Direktorat PG Dikdas tahun ini ada program prioritas atau apa saja yang akan dilakukan untuk setahun ini?

Program prioritas PG Dikdas di 2019 adalah kita melaksanakan zonasi mutu dalam rangka untuk peningkatan mutu guru melalui penguatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) maupun Kelompok Kerja Guru (KKG). Dalam rangka melakukan itu maka kita akan menyelesaikan bimbingan teknis untuk penyiapan instruktur yang tahun 2018 sudah 1.000 widyaiswara sebagai narasumber, maka tahun ini kita lengkapi dengan 2.200 instruktur nasional. Para instruktur ini yang dia kemudian akan melaksanakan bimbingan teknis calon guru inti yang akan kita tugaskan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi pelaksanaan MGMP dan KKG.

Yang kedua, penyaluran tunjangan profesi, kemudian tunjangan khusus untuk para guru akan tetap diprioritaskan di tahun 2019 ini. Yang tak kalah pentingnya adalah pelaksanaan program pendidikan profesi guru. Ini adalah dalam rangka untuk menyiapkan guru-guru di Indonesia mempunyai kompetensi yang unggul baik dalam aspek pedagoginya, profesionalismenya, kepribadian dan sosial. Tahun 2019 ini 49.000 guru akan kita panggil untuk mengikuti PPG. Di samping itu kita memberikan program remedial kepada 1.600 guru daerah khusus yang tahun 2018 telah mengikuti PPG, tapi belum berhasil lulus. Diharapkan dengan program remedial PPG ini guru-guru daerah khusus tersebut bisa lulus dalam ujian untuk mendapatkan sertifikasi sebagai pendidik.

Kita juga punya program kemitraan. Tahun ini kita

bermitra dengan TNI untuk membekali para tentara yang bertugas di daerah perbatasan, di Nunukan dan Malinau. Dan alhamdulillah 900 tentara sudah mendapatkan pembekalan tentang kemampuan pedagogi, sehingga bisa mengajarkan keterampilan-keterampilan dasar pada peserta didik. Di samping itu juga masih ada program guru mitra. Dimana guru-guru yang unggul, guru-guru hebat, kita mitrakan dengan guru-guru kita yang di daerah timur, di daerah perbatasan, daerah pinggiran. Mereka belajar bersama didampingi. Dengan program kemitraan ini diharapkan terjadi transfer pengetahuan, transfer pengalaman dari guru-guru hebat kita kepada guru-guru yang ada di wilayah pinggiran.

Dalam rangka untuk Hari Pendidikan Nasional kita masih melaksanakan Olimpiade Guru Nasional. Sekarang sudah mulai di tahap seleksi. Kemudian juga pemilihan guru berprestasi. Yang terakhir Direktorat ini sangat menaruh perhatian untuk layanan pendidikan bagi anak-anak kita yang tinggal di Malaysia. Dengan pengiriman guru yang akan kita tempatkan di Community Learning Center.

Tentu masih ada satu lagi terkait dengan tugas utama Direktorat ini mengawal bagaimana penilaian kinerja dan pengembangan karier dari para guru kita terfasilitasi diantaranya dengan penilaian angka kredit untuk golongan IVB ke atas dan sekaligus juga untuk penilaian guru-guru yang bukan PNS. Kalau mereka sudah lulus PPG untuk kita lakukan verifikasi validasi dengan program inpassing sehingga mereka kemudian yang dinyatakan lolos, maka guru-guru bukan PNS yang sudah bersertifikasi pendidik, mereka berhak diberikan tunjangan profesi.

Menyambut Ujian Nasional, kaitan antara kebijakan zonasi dan penataan guru?

Zonasi adalah pendekatan yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam rangka untuk menyebar luaskan sekolah-sekolah berwawasan keunggulan. Kita tidak ingin lagi ada istilah sekolah-sekolah favorit karena harus terjadi pemerataan mutu pendidikan. Dan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan kebijakan zonasi ini adalah dalam rangka peningkatan mutu lulusan melalui optimalisasi peran guru. Kita tidak ingin guru-guru yang unggul, guru-guru yang bagus itu terkonsentrasi hanya di beberapa sekolah saja. Dengan pendekatan zonasi ini maka guru-guru berkualitas bisa disebar, bisa dioptimalkan untuk mereka mengajar, mengelola pendidikan, pembinaan proses belajar mengajar di sekolah-sekolah yang notabene kondisi sekarang masih harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan pendekatan zonasi ini maka diharapkan pemerataan kualitas pendidikan menjadi bisa direalisasikan.

Pada UN terdapat soal higher order thinking skills sebanyak 10 s.d. 15%, untuk penyiapan guru menghadapi

HOTS ini?

Menyongsong era ke depan, manusia unggul yang mampu berpikir kritis, kemampuan kreatif, punya jiwa komunikasi dan kerja sama yang baik itu sangat dibutuhkan. Dan untuk menyiapkan SDM unggul seperti itu, pembelajaran perlu dikelola secara unggul. Nah karakter pembelajaran unggul adalah karakter pembelajaran yang bisa mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik secara maksimal.

Maka kemudian kita memperkenalkan satu pendekatan pengajaran yang kita sebut sebagai higher order thinking skills. Suatu pembelajaran yang mengajarkan keterampilan tingkat tinggi kepada peserta didik. Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah harus kita imbangi dengan proses penilaian yang baik. Maka kita harus membiasakan kepada guru-guru kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara HOTS. Peserta didiknya pun juga dinilai, dievaluasi secara dengan soal-soal yang berkarakter HOTS.





Sehingga Ujian Nasional di tahun ini kita tetap memberikan porsi. Harapannya anak-anak kita terbiasa melakukan proses berpikir kritis, kemudian mampu melakukan analisis, mensintesa. Itulah sebabnya Ujian Nasional yang kita gunakan sebagai alat untuk mengetahui kualitas pendidikan secara merata, secara nasional, kita tetap akan berikan porsi yang lebih besar kepada soal-soal yang berkarakter HOTS ini.

Terkait kemampuan abad 21 yang 4C. Bagaimana menyiapkannya ke guru, apa dengan bimbingan teknis atau cara lainnya?

Sekarang persoalan mendasar kita masih banyak guru-guru kita yang belum berkesempatan mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis. Dengan adanya MGMP, guru-guru kita di situ punya wadah untuk memahami apa itu masalah belajar dia, kemudian mencari solusinya. Dan kalau memang dibutuhkan narasumber dari luar, MGMP bisa menghadirkan narasumber dari luar dengan bantuan operasional yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bimbingan teknis instruktur nasional, bimbingan teknis calon guru inti itu adalah dalam rangka membekali kepada para fasilitator, para guru inti tentang kemampuan untuk mengelola atau melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi itu kepada guru-guru.

Bagaimanakah optimalisasi MGMP untuk meningkatkan kompetensi guru?

Selain kita menyiapkan para guru, kita juga membekali para guru dengan satu bahan yang kita sebut unit pembelajaran. Nanti di MGMP, MGMP itu guru akan mendapatkan hasil analisa terhadap capaian skor UN dari anak-anak. Nah guru bisa melihat pada soal nomor berapa anak-anak itu mengalami kesulitan, kemudian dia

ambil materinya dengan melihat unit pembelajarannya.

Di situlah dengan MGMP yang dilaksanakan dengan sistem in, on, in, on yang setara dengan 82 jpl atau terakui dengan 2 kredit. Kita berharap dengan pendekatan MGMP bisa menjadi solusi para guru untuk dia meningkatkan mutu, kompetensinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ciri dari kegiatan pembelajaran itu inline dengan upaya menyongsong abad 21 dengan karakter yang penuh pemikiran kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif tadi.

Bagaimana Anda melihat bimbingan teknis penguatan kompetensi dalam proses pembelajaran di kelas kepada personel TNI AD pada satuan pendidikan di daerah 3T?

TNI itu kan menjaga keselamatan bangsa, kalau pendidikan mewujudkan kecerdasan bangsa. Jadi ini satu tugas besar. TNI yang ditugaskan di perbatasan adalah berada pada wilayah geografis yang itu menjadi hambatan besar bagi terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkualitas. Sehingga menyempang para TNI melakukan tugas penyelamatan penjagaan kepada negara, maka interaksi dia dengan masyarakat, kita optimalkan peran dan fungsinya. Tidak hanya dia menjaga keutuhan negara, tapi kita perbantukan untuk mengisi kekosongan-kekosongan atau ketiadaan guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Jadi boleh dikatakan pembekalan yang dilakukan kepada TNI itu bisa menjadi guru cadangan.

Bahkan dalam jangka panjangnya pelaksanaan tugas tambahan, sampingan, pengajaran di sekolah, itu bisa menjadi entri positif bagi tentara itu sendiri. Bisa jadi ada ketertarikan dia untuk lebih menekuni dunia pendidikan. Maka selepas penugasan, dia bisa tuh ngambil S1 di pendidikan. Sehingga kalau nanti ada kondisi darurat, ada bencana, seperti di NTB, Sulawesi Tengah, atau gangguan keamanan seperti di Papua, Aceh, Poso, di mana guru-guru kita tidak bisa mengajar di sana karena kondisi tidak aman. Para TNI itu dengan kemampuannya bisa diterjunkan untuk mengisi kegiatan belajar

mengajar. Itu jangka panjang yang memungkinkan untuk bisa dilakukan oleh Kemdikbud dengan TNI terkait dengan tindak lanjut kerja sama.

Teknologi informasi sudah maju, siswa bisa mencari bahan pelajarannya sendiri. Bagaimanakah peran guru dalam menghadapi situasi zaman tersebut?

Guru-guru kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Kalau guru-guru kita tidak melek teknologi, tidak melek informasi, pembelajaran yang dia lakukan tidak akan disukai oleh anak-anak. Bahkan lebih celaknya dia bisa tertinggal oleh anak-anak. Karena anak-anak dengan dunia yang sangat terbuka bisa dapat informasi dari banyak sumber. Guru kita kalau tidak mengimbangi kemampuan dirinya dengan memanfaatkan teknologi, jaringan internet, dan sebagainya, maka dia akan menjadi guru yang membosankan, itu merupakan kemunduran.

Yang kedua, dengan kemampuan teknologi yang dimiliki para guru, sebenarnya memudahkan bagi para guru agar dia bisa mengambil media, bahan-bahan ajar, pengalaman-pengalaman dalam pengajaran dari sumber mana pun saja. Sehingga para guru cukup dengan searching di internet, mengambil yang sesuai dengan konsep atau pun tema yang akan diajarkan, kemudian disampaikan dan didiskusikan dengan anak-anak. Jadi teknologi tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Yang jelas kalau para guru kita kreatif, inovatif, pembelajaran itu akan semakin berkualitas.

Program kemitraan guru mengenai berbagi praktik baik bisa lebih dijelaskan. Akhirnya bisa mengurangi disparitas kualitas antara timur dan barat?

Jujur saja bahwa konsentrasi guru-guru yang berkualitas, by data pun tidak bisa kita pungkiri mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa, mayoritas terkonsentrasi di ibu kota-ibu kota provinsi atau kabupaten. Tetapi, sangat banyak guru-guru kita yang kita tugaskan di daerah-daerah, kepulauan, daerah-daerah yang sulit dijangkau, mereka memiliki banyak persoalan dalam rangka untuk bagaimana bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik.

Nah kita dengan menyandingkan dengan program pendampingan dengan guru mitra kepada guru imbas. Kita harapkan terjadi semacam pengalihan atau transfer contoh-contoh baik dari guru-guru yang berprestasi kepada guru-guru kita yang ada di daerah. Sehingga dalam kalkulasi kami dengan 100 guru inti maka itu akan bisa mengimbas kepada 40.000 guru imbas. Nah kalau ini bisa dilakukan dengan jumlah yang lebih besar, maka akan semakin banyak guru-guru yang mereka dalam rangka meningkatkan kompetensinya itu bisa didampingi secara langsung oleh guru-guru kita yang mereka "memiliki kompetensi unggul" dalam melaksanakan tugas sebagai seorang guru.

Tips khusus menghadapi generasi Z, serta menyikapi beberapa siswa yang kurang sopan terhadap guru?

Guru kita harus menjadi guru yang sangat terbuka. Guru kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, juga bisa

memberi solusi terhadap persoalan, terhadap keinginan dari para peserta didiknya. Sekarang kita tidak hanya cukup dengan guru yang pintar, tapi kalau dia tidak bisa bergaul secara baik dengan anak-anak juga tidak akan optimal untuk membantu anak-anak kita.

Nah yang kedua, saya sangat berharap kepada guru-guru di Indonesia jangan pernah berhenti belajar. Meskipun kita sudah S1, tapi dunia ini pergerakannya cepat, perubahan yang terjadi di masyarakat itu harus mampu kita ikuti. Apalagi pendidikan menyiapkan satu generasi untuk mengantisipasi kehidupan di masa yang akan datang. Hari ini kalau dunia pendidikan kita hanya menyelesaikan masalah untuk hari ini, maka ketika anak-anak lulus, masalah dia sudah berbeda.

Karakter seorang guru itu harus futuristik. Dia harus tahu 20 tahun yang akan datang anak-anak itu eranya mau seperti apa. Tugas pendidikan adalah menyiapkan anak-anak agar mampu, kuat dengan dunia dia di 20 tahun yang akan datang.

Pendidikan yang komprehensif menyangkut apa saja?

Jadi gini, saya senang dengan suatu analisa begini, manusia itu punya 3, ada fisik, raga kita; kemudian ada otak; kemudian ada jiwa. Olahraga itu konsumsinya raga. Jadi raga kita agar sehat, kuat, ya olahraga dan nutrisi yang baik. Pendidikan adalah nutrisinya otak, maka harus baca, belajar, itu untuk menutrisi otak. Kemudian jiwa punya nutrisi, dia butuh nutrisi yang berbeda, merenung, meditasi, zikir kalau bahasa agamanya, itu adalah nutrisinya jiwa. Manusia yang utuh, raga, jiwa, dan pikirannya itu berkembang semuanya.

Bagaimana Anda melihat kegiatan pelatihan guru di luar negeri?

Kita ingin guru-guru kita memiliki wawasan berpikir yang luas. mereka bisa melihat apa yang terjadi di luar sana. Dalam rangka agar guru-guru kita ini memiliki kemampuan berkembang yang tinggi. Dalam kaitan itu maka Direktorat PG Dikdas mendapatkan pembiayaan untuk mengirimkan 100 guru. Yang 50 ke Cina, kemudian sebagian ke Belanda dan Australia. Guru-guru ini kita kirim untuk belajar lebih dalam tentang keterampilan berpikir tingkat tinggi tadi, HOTS. Dan guru ini kita seleksi, kita ambil dari guru-guru yang menunjukkan prestasi unggul dalam Olimpiade Guru Nasional, guru berdedikasi, maupun dalam guru berprestasi.

Nah mereka belajar di sana selama 3 pekan. 2 pekan di kampus, 1 pekan kunjungan sekolah. Melalui kegiatan ini kita berharap para guru kita belajar bagaimana guru di negara-negara yang dikunjungi itu mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mengajarkan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

Dengan pengalaman itu, dengan pengetahuan itu, sepulang mereka dari tempat mereka dikirim. Nah mereka akan mempresentasikan apa yang dia pelajari di sana, kemudian apa yang akan dia lakukan sekembali dia dari program itu. Salah satu yang kita minta dari guru kita adalah mereka tidak hanya meningkat kompetensinya secara pribadi, tetapi mereka kita minta untuk mendiseminasikan pengetahuan dan keterampilan yang dia punya kepada guru-guru lain yang ada di sekolahnya maupun guru yang ada di sekolah sekitarnya tempat dia mengajar.

KEBIJAKAN ZONASI DAN PENATAAN GURU



Sistem zonasi pendidikan yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan strategis jangka panjang untuk percepatan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh penjuru nusantara, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, hingga pendidikan masyarakat.

Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk wajar (wajib belajar) 12 tahun.

Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Dampak dari sistem zonasi ini tidak hanya mengatur soal bagaimana prioritas siswa dalam memilih sekolah berdasarkan jarak, melainkan juga masalah pemerataan guru yang ada saat ini. Karena saat ini, sebaran guru di Indonesia masih belum merata.

"Implementasi zonasi pendidikan secara langsung juga akan berdampak kepada distribusi guru yang lebih merata. Selama ini banyak daerah yang mengeluh kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil yang rupanya cukup mengganggu jalannya sistem proses belajar mengajar di kelas. Di kota-kota besar, jumlah guru yang berstatus PNS dapat dikatakan kelebihan kuota," kata Mendikbud Muhadjir Effendy. "Antara guru negeri (PNS) yang bersertifikat kemudian PNS yang belum bersertifikat, guru honorer itu harus merata di semua sekolah, tidak boleh menumpuk di satu sekolah,"

lanjutnya.

Melalui sistem zonasi pendidikan, guru dapat dipetakan dan didistribusikan berdasarkan statusnya sehingga tidak ada penumpukan guru di suatu sekolah tertentu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam menentukan kebutuhan mereka mulai dari ketersediaan guru sampai sarana dan prasarana lainnya. Dalam implementasi zonasi ini, pemerintah daerah tentunya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Sistem zonasi dan guru nantinya akan mempermudah koordinasi guru antar jenjang sehingga menjamin kontinuitas pembelajaran, mempermudah redistribusi guru berkualitas, penguatan Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKKS), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKPS) antar jenjang pendidikan, mendekatkan guru dengan orang tuanya sehingga memperkuat pembinaan peserta didik, serta pelatihan dan pembinaan guru sesuai dengan kebutuhan zona.

Kebijakan Zonasi dan Peningkatan Kualitas Guru

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyatakan bahwa kebijakan zonasi adalah strategi untuk menyelesaikan masalah pendidikan yang kompleks di Indonesia. Jika selama ini pemerintah melakukan pendekatan yang sifatnya makro, maka dengan zonasi, penyelesaian permasalahan pendidikan

KENAPA KEBIJAKAN ZONASI YANG DIPILIH?



Ada beberapa tujuan dari sistem zonasi, di antaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga.

Melalui sistem zonasi, guru dapat dipetakan dan didistribusikan berdasarkan statusnya sehingga tidak ada penumpukan guru di suatu sekolah tertentu.

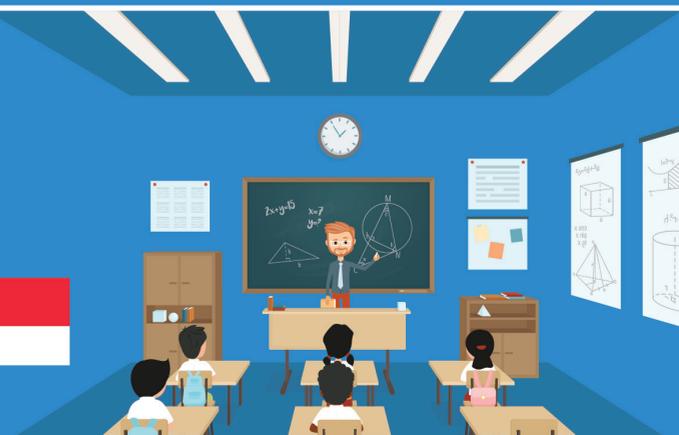


Sistem zonasi juga bertujuan menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, dan mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.



Untuk pemerintah daerah, sistem zonasi dapat membantu pemda dalam memberikan bantuan/afirmasi agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kualitas pendidik.

Singapura telah menerapkan zonasi sejak 12 tahun yang lalu. Australia, Amerika Serikat, dan Jepang juga menerapkan sistem zonasi dalam pendidikan





menggunakan pendekatan mikro di setiap zona.

“Selama ini kita melihat persoalan pendidikan itu terlalu makro, karena makro maka tidak fokus. Tapi nanti kalau sudah diiris menjadi lebih dari 4.800 zona, nanti akan kita selesaikan di masing-masing irisan itu,” demikian disampaikan Mendikbud Muhadjir Effendy pada Taklimat Media RNPk 2019, di Depok, Rabu (13/2/2019).

Melalui pendekatan mikro, Mendikbud meyakini para pemangku kepentingan pendidikan dapat mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi permasalahan secara lebih mendalam. Dicontohkannya, isu mengenai distribusi guru, sarana prasarana, maupun sebaran peserta didik yang tidak merata.

Sejalan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, maka Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan:

- >> Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona;
- >> Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona;
- >> Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana sekolah; dan
- >> Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah Daerah.

Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano, fokus

pelaksanaan program Ditjen GTK di tahun 2019 adalah mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Pengembangan kompetensi guru akan merujuk pada potret mutu yang sudah cukup spesifik, seperti analisis hasil Ujian Nasional. Dicontohkannya, jika nilai matematika pada ujian nasional di suatu zona masih rendah, maka para guru di dalam zona tersebut akan berdiskusi tentang strategi peningkatan mutu mata pelajaran matematika di zona tersebut.

“Ada masalah apa? Geometri atau Aljabarnya atau Kalkulusnya? Kan ada guru di zona itu yang pintar materi itu, nanti didiskusikan di MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) di zona itu. Jadi namanya peningkatan kompetensi proses pembelajaran,” jelas Dirjen GTK Kemdikbud Supriano.

Melalui pendekatan sistem zonasi, pemerintah akan mendorong pelatihan guru profesional oleh MGMP dan Kelompok Kerja Guru (KKG). “Yang menyiapkan guru inti dan instruktur kabupaten/kota itu Ditjen Dikdasmen (Pendidikan Dasar dan Menengah). Kami di Ditjen GTK yang menyiapkan model pembelajarannya, kemudian unit-unit pembelajaran, bukan modul. Guru inti menjadi fasilitator bersama guru-guru di zona itu,” tuturnya.

Higher Order Thinking Skills Bekal Bersaing di Abad 21

KOMPETENSI

Para peserta didik perlu dibiasakan soal *higher order thinking skills* yang nantinya akan menjadi bekal bagi mereka untuk bersaing di abad ke-21.



Pengenalan model soal penalaran merupakan salah satu tuntutan kompetensi dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Soal-soal yang menuntut penalaran dikenal secara luas sebagai keterampilan-keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills atau HOTS). Dengan begitu, peserta didik diharapkan mampu menganalisa data, membuat perbandingan, membuat kesimpulan, menyelesaikan masalah, dan menerapkan pengetahuan pada konteks kehidupan nyata.

Soal-soal penalaran juga telah diterapkan pada Ujian Nasional tahun 2018 dan 2019 dengan komposisi sekitar 10 s.d. 15 persen. Hal itu dilakukan sebagai ikhtiar untuk menyesuaikan secara bertahap standar pendidikan Indonesia dengan standar internasional, antara lain seperti standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Berdasarkan survei Programme for International Student Assessment (PISA), Indonesia berada di urutan ke-64 dari 72 negara yang disurvei. Skor literasi sains pada PISA 2015 adalah 403, naik 21 poin dari skor PISA 2012 yang berada di angka 382. Prestasi ini menempatkan literasi sains Indonesia mengalami kenaikan 6 tingkat dari posisi 2 terbawah di tahun 2012. Namun sayangnya masih di bawah rata-rata skor Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Indonesia harus mengejar ketertinggalan serta menyiapkan peserta didik untuk zaman mendatang. Mendikbud menyatakan secara bertahap pemerintah mendorong pembelajaran abad 21 yang salah satu cirinya adalah penalaran. Sejak beberapa tahun terakhir, guru-guru dilatih untuk mampu mengajar dan melakukan evaluasi atau penilaian hasil belajar dengan metode yang mendorong penalaran tingkat tinggi.

Sementara itu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemdikbud) Supriano menyatakan bahwa kunci sukses di abad ke-21 adalah 4C (creativity, critical thinking, communication, collaboration).

"Ada 4 kompetensi yang diperlukan untuk bersaing di abad ke-21. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Saya berikan contoh critical thinking. Kalian bisa berbicara, kalian bisa berkomunikasi, tetapi kalian punya rasional. Kalian jangan asal bicara saja, tapi kalian tidak punya rasional, tidak berani mengatakan yang benar itu benar, berani komunikasi. Kompetensi itu yang harus dimiliki," jelas Supriano.

Kemdikbud Tingkatkan Mutu Pendidikan

Perubahan Regulasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Mendikbud menambahkan, saat ini guru bisa menjadi kepala sekolah dengan mendapatkan tunjangan khusus. Tugas kepala sekolah sendiri akan lebih fokus sebagai manajer sekolah.



Kesejahteraan bagi para guru dan tenaga pendidikan hingga kini masih terus diperjuangkan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud terus melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan di tanah air melalui peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Salah satu upaya peningkatan profesionalisme PTK yang dilakukan adalah melakukan perubahan regulasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Perubahan regulasi pendidik dan tenaga kependidikan disini adalah perubahan regulasi tentang guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.

Dalam upaya memaksimalkan kinerja guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang guru, dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2017. Poin penting dari regulasi ini adalah menyangkut beban kerja guru PNS, yakni: mencakup merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan menilai pembelajaran, melatih dan membimbing peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Beban kerja guru dimaksud paling sedikit memenuhi 24 jam tatap muka dan paling banyak 40 jam tatap muka dalam seminggu.

Terkait perubahan regulasi tentang guru, Ditjen GTK Kemdikbud pada

tahun 2019 dalam mendukung tugas guru agar lebih profesional dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa dengan menyelenggarakan program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mengatakan, kepala sekolah dan pengawas sekolah merupakan dua unsur penting dalam pengelolaan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Hal tersebut diutarakan Mendikbud saat memberikan pengarahannya pada bimbingan teknis fungsional calon pengawas sekolah dan penguatan kompetensi pengawas sekolah, beberapa waktu lalu.

“Sehingga dalam upaya memberikan penguatan dalam peningkatan kinerja pengawas pemerintah melakukan pelatihan yang dikembangkan tidak hanya sekadar pelatihan konvensional yang selama ini dikembangkan, tetapi pelatihan yang benar-benar menyentuh sisi intrinsik para peserta,” ungkap Mendikbud.

Mendikbud menambahkan, saat ini guru bisa menjadi kepala sekolah dengan mendapatkan tunjangan khusus. Tugas kepala sekolah sendiri akan lebih fokus sebagai manajer sekolah.

“Sudah ada PerMen-nya (fungsi kepala sekolah). Intinya kita alihkan selama ini kepala sekolah hanya sebagai tugas tambahan seorang guru, sekarang itu betul-betul pekerjaan tersendiri,” katanya.

Dalam Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tersebut juga dijelaskan tugas pokok seorang kepala sekolah yang tidak lagi merangkap sebagai seorang guru. Melainkan fokus sebagai seorang manajer sekolah, bertugas mengembangkan dan meningkatkan mutu sekolah.

“Guru yang kemudian ditugaskan sebagai manajer sekolah. Jadi, kepala sekolah dan pengawas itu nanti adalah jabatan karier seorang guru yang selama ini tidak dianggap jabatan karier,” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Supriano, menambahkan, pelatihan itu bertujuan untuk membangun tata kelola tenaga kependidikan khususnya pengawas sekolah.

Hal senada juga dijelaskan, Kasubdit Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karir untuk Pendidik Kemendikbud, Renny Yunus. Menurutnya, jumlah pengawas sekolah di Tanah Air mencapai 30.000. Dengan adanya aturan dari Permenpan menyebutkan bahwa pengawas yang sudah menjabat sejak 1 Juli 2017 tidak diwajibkan untuk mengikuti pelatihan.

“Pola pelatihannya 71 jam. Untuk itu, kami mencetak instruktur nasionalnya dulu, baru kemudian pelatihan hingga ke tingkat kabupaten. Begitu juga untuk calon pengawas, mereka wajib mengikuti pelatihan ini,” ujarnya.

KOMPOSISI SOAL UJIAN NASIONAL

dapat dilihat sebagai berikut:



LALU BAGAIMANA CARA MENGHADAPI ANAK SD DAN SMP?

- Di fase umur tersebut, mereka menyukai kejutan.
- Anak usia SD dan SMP suka didengarkan.
- Menjadi motivator bagi peserta didik. Jadilah sumber inspirasi dan penguat jiwa anak didik. Jangan sungkan untuk memuji.
- Jangan memberikan pertanyaan beruntun. Berikanlah jeda antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya, karena anak SD-SMP butuh untuk dihargai manakala mereka menjawab dengan benar.



UJIAN NASIONAL DAN KEMAMPUAN PROBLEM SOLVING GURU



Ujian Nasional (UN) memberikan informasi kepada guru terkait capaian hasil pembelajaran siswa. Hasil UN akan diolah dan dianalisis. Pada poin mana siswa mendapat nilai rendah, para guru harus berupaya melakukan peningkatan kemampuan belajar siswa.



Guru bisa melihat, mata pelajaran apa yang capaian belajarnya masih rendah. Misalnya matematika, dari analisis butir soal, semua guru di zonasi, akan tahu konsep apa saja siswa mendapat skor rendah. Misalnya aljabar, diurai lagi, unit pelajaran apa yang rendah. Umpamanya, unit pembelajaran operasional pecahan.

Guru-guru dalam zonasi tersebut, mengikuti Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) mendiskusikan persoalan belajar yang dihadapi siswa pada unit pembelajaran operasional pecahan. Sehingga dalam pertemuan KKG/MGMP, modul diurai menjadi unit-unit pembelajaran. Guru-guru peserta MGMP difasilitasi oleh guru inti berdiskusi mencari solusi konsep operasional pecahan kenapa menjadi problem siswa mendapat skor rendah. ini namanya pendekatan problem solving. Guru berkumpul membahas isu unit pembelajaran yang menjadi persoalan siswa.



Pelatihan Guru ke Luar Negeri

Era Revolusi Industri 4.0



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengirim 1.000 guru ke luar negeri untuk mengikuti pelatihan pada 1 Maret 2019. Guru yang dikirim itu terdiri dari tenaga pendidik di jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK. Mereka disebar ke 12 negara, yakni Korea, Finlandia, Australia, Jerman, Jepang, Prancis, Singapura, Tiongkok, Hong Kong, dan Belanda.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pengiriman ini bertujuan agar mereka mendapat pengalaman dalam sistem pembelajaran di era Revolusi Industri 4.0. Meski hanya selama tiga minggu, tapi dia yakin para guru bisa mengambil manfaat dari pelatihan itu.

Muhadjir Effendy juga berharap agar para peserta Program Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan ke Luar Negeri Tahun 2019 ini menjadi kekuatan yang bisa mengubah pendidikan di Indonesia.

"Kalian adalah kekuatan yang bisa mengubah keadaan pendidikan di Indonesia. Manfaatkan ini," ujarnya saat melepas peserta Program Pelatihan PTK ke Luar Negeri Tahun 2019 di Plaza Insan Berprestasi, Kompleks Kemdikbud Senayan, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Sementara itu, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Supriano mengatakan bahwa program pendidikan dan pelatihan guru ke luar negeri ini bertujuan untuk memfokuskan peningkatan mutu SDM sebagai bagian dari program pemerintah dan negara.

"Jika SDM bagus dengan mendapatkan pendidikan baik, maka akan berpengaruh pada peningkatan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan kita," tuturnya.

Sedangkan Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud, Wisnu Aji menjelaskan kebijakan pengiriman guru ke luar negeri sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kualitas SDM, yakni membuka wawasan dan pengetahuan global

kepada guru.

Misalnya terkait pelatihan skill, pembelajaran abad 21, juga masalah ilmu pendidikan, lokakarya, workshop, observasi sekolah dan kelas, kunjungan industri bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah kejuruan, dan praktek kerja industri. Lebih lanjut Wisnu Aji mengutarakan, selama mengikuti program pendidikan dan pelatihan di luar negeri, para guru dan tenaga pendidik diharapkan dapat menyerap semua materi yang diberikan, untuk kemudian dipraktikkan serta menyalurkannya kepada sesama guru di daerah masing-masing.

Menurut dia, pelatihan di luar negeri dapat membantu pendidik dan tenaga kependidikan dalam membimbing peserta didik untuk berkembang dalam mengarungi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat berubah di abad ke-21, serta menghadapi era revolusi industri 4.0.

Reformasi Birokrasi Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja



Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono menyampaikan kata sambutan pada Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi Internal 2019 di Puri Denpasar Hotel Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur negara.

Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi Internal 2019. Kegiatan tersebut digelar di Puri Denpasar Hotel Jakarta, Selasa (16/4/2019) diikuti oleh seluruh pegawai, staf dan pimpinan di lingkungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai

pemerintahan yang profesional untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah.

Dalam kegiatan ini seluruh peserta mendapatkan dua materi. Materi pertama terkait reformasi birokrasi internal di Kemendikbud yang disampaikan oleh Tim Reformasi Birokrasi Internal Kemendikbud, Hindun Basri Purba. Sementara materi kedua terkait penanganan benturan kepentingan, gratifikasi dan aplikasi whistle blowing system oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Sujana Gitanegara.

Acara ini berlangsung dinamis dari awal hingga akhir. Untuk meningkatkan dan komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi, seluruh pegawai, staf dan pimpinan

menandatangani pakta integritas. Penandatanganan pakta integritas ini diharapkan akan memaksimalkan mereka dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Kemendikbud, khususnya di lingkungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar.

Meningkatkan Kinerja

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur negara. Berbagai masalah atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional.

Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Praptono mengatakan kegiatan sosialisasi program reformasi birokrasi internal 2019 yang dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sangat penting dilakukan.

Dia mengatakan tujuan dari kegiatan ini untuk memberikan pemahaman mengenai pemerintah yang profesional untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

"Kegiatan ini diadakan dalam rangka memberikan pemahaman dan sekaligus penguatan kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar mulai dari tingkat karyawan baik yang berstatus PNS maupun non PNS. Dan termasuk para pimpinan sehingga upaya Kemendikbud dalam rangka menyempurnakan dan menguatkan birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapat dukungan yang maksimal," kata Praptono.

Selain itu, Praptono menambahkan program ini dirancang dalam rangka mengungkit kembali nilai reformasi birokrasi di internal Kemendikbud. Sehingga kebijakan yang telah digulirkan oleh menteri mendapat dukungan yang maksimal dari seluruh pegawai. "Reformasi birokrasi sudah diselenggarakan sudah lama dari tahun ke tahun dan skor penilaian selalu memuaskan. Tapi pada penilaian 2018 terjadi penurunan," ujarnya.

Praptono menambahkan hal ini tidak boleh dibiarkan. Perlu ada upaya sehingga skor penilaian akan lebih baik dan meningkat. "Penurunan ini kami respons dengan cepat untuk kembali



Para pejabat di lingkungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud menandatangani pakta integritas pada Sosialisasi Program Reformasi Birokrasi Internal 2019.

memulihkan nilai reformasi birokrasi di Kemendikbud kembali naik. Minimal pada tahun 2019 mendapatkan skor 76," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini dia berharap seluruh pegawai, baik staf dan pimpinan di lingkungan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar kembali meningkatkan kinerja, yakni dengan cara menumbuhkan kesadaran kepada seluruh pegawai agar bekerja secara maksimal dalam memberikan layanan publik, merespons secara cepat dan menanamkan tanggung jawab terhadap pelaksana tugas.

"Dan yang paling penting adalah membangun kekuatan integritas di seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Pendidikan Dasar," ucapnya.

Pada kesempatan itu dia berpesan kepada seluruh peserta untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Dia menambahkan sebagai orang yang beriman kita harus memiliki semangat yang kuat untuk memberikan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya.

"Kita sebagai umat Islam harus mengamalkan apa yang disampaikan rasul kita, Muhammad. Beliau mengingatkan agar kita harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jika hari ini lebih buruk, maka kita termasuk orang yang celaka. Jika hari ini sama dengan hari sebelumnya kita termasuk orang

yang merugi. Jika hari ini lebih baik, maka termasuk orang yang beruntung. Maka berikan yang terbaik di setiap hari-hari kita agar menjadi manusia beruntung," tutupnya.

Bebas dari Korupsi

Sementara itu pada kesempatan yang sama Inspektoral Jenderal Kemendikbud Sujana Gitanegara meminta kepada seluruh peserta untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi di lingkungan Kemendikbud. Dia mengatakan bahwa sasaran reformasi 2015-2019 ada tiga, salah satunya mewujudkan birokrasi yang jujur dan akuntabel.

"Sasaran reformasi birokrasi untuk 2015-2019 ada tiga. Pertama, mewujudkan birokrasi yang jujur dan akuntabel; kedua, birokrasi yang efektif dan efisien; dan ketiga, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas," kata Sujana Gitanegara.

Dia mengatakan sosialisasi program reformasi birokrasi internal di Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar sangatlah bagus. Ini merupakan upaya yang serius untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Kegiatan ini sangat bagus. Ini bisa memaksimalkan program reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian



Pendidikan dan Kebudayaan. Yakni mewujudkan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan Kementerian dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government),” jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan melalui kegiatan ini bisa memperkuat penguatan pengawasan. Sebab dalam acara tersebut dimulai dengan adanya penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai, staf hingga pimpinan. Dengan menandatangani pakta integritas tersebut mereka akan berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi lebih optimal.

Selain itu, pada kegiatan ini mereka diberikan pengetahuan soal pencegahan korupsi, pengendalian gratifikasi, masalah konflik kepentingan, bagaimana sistem whistle blower berjalan sampai dengan manajemen risiko.

“Semoga ke depannya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pelaksanaan reformasi birokrasi lebih baik dari saat ini. Dan ini ke depannya tidak hanya menjadi program tapi menjadi budaya kita semua, yakni budaya menjadi pribadi yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas,” ujar Inspektorat Jenderal Kemendikbud Sujana Gitanegara.

Menurutnya melalui kegiatan ini merupakan upaya preventif untuk mewujudkan birokrasi yang bersih. “Materi yang disampaikan yakni mengenai konflik kepentingan. Dari konflik kepentingan akan menimbulkan korupsi dalam bentuk gratifikasi, suap, pemerasan.

Maka jika ada yang berupaya memberikan gratifikasi mereka bisa mengantisipasi,” ungkapnya.

“Adanya Whistle Blowing System ini juga menjadi salah satu cara yang efektif mewujudkan birokrasi yang bersih. Dan melalui manajemen risiko itu semua terkelola ada sistem pengendalian yang baik dan upaya-upaya pencegahan,” imbuhnya.

Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel

Hal senada disampaikan Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hindun Basri Purba. Menurutnya kegiatan ini sangat penting dilakukan. Ini merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

Menurutnya sudah menjadi kewajiban semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemendikbud memahami arti reformasi birokrasi.

“Berbagai permasalahan atau hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah yang tidak berjalan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional,” jelasnya.

Lebih lanjut dia mendukung penuh

dengan adanya sosialisasi reformasi birokrasi internal ini. Sehingga ke depan pemerintahan khususnya di lingkungan Kemendikbud akan semakin lebih baik dan bersih dari korupsi.

“Tentunya sasaran dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.

Dia berharap setelah sosialisasi ini seluruh pegawai, staf, dan pimpinan menjalankan reformasi birokrasi secara maksimal. Dan akan melahirkan aparatur sipil negara yang memiliki semangat tinggi dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

“Tentunya tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah membangun profil dan perilaku aparatur negara yang berintegritas tinggi, produktif, bertanggung jawab dan pelayanan prima,” harapnya.

Banyak persoalan guru di Indonesia yang perlu dibenahi. Terlebih, guru dan tenaga kependidikan dituntut untuk bisa menyajikan proses pembelajaran yang interaktif dan mampu merangsang otak siswa. Hal itu semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Supriano, mengatakan, salah satu yang akan dibenahi adalah kemampuan pedagogi atau ilmu pengajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Untuk meningkatkan kemampuan ini, Kemendikbud akan mengubah fokus pelatihan.

"Tahun ini kami akan geser, jadi 70 persen porsi untuk peningkatan pedagogi guru dan 30 persennya untuk konten," kata Supriano.

Semula, lanjut Supriano, pelatihan guru fokus pada konten pengajaran. Namun, tahun ini pelatihan akan difokuskan pada peningkatan kemampuan pedagogi guru. Hal

itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) tahun 2019 yang berlangsung mulai tanggal 11 hingga 14 Februari. Menurut dia, beberapa persoalan guru di Indonesia di antaranya adalah kemampuan pedagogi guru di Indonesia masih lemah, tidak meratanya guru, hingga persoalan-persoalan kesejahteraan bagi para guru honorer. Dia berharap, RNPK menjadi wadah untuk merumuskan solusi atas semua permasalahan guru.

Supriano mengatakan, pemerintah saat ini telah membagi seluruh wilayah di Indonesia ke dalam sekitar 1.900 zona. Nantinya redistribusi guru akan dilakukan per zona. Dengan program zonasi itu diharapkan pemerataan guru bisa segera terwujud.

Supriano mengungkapkan bahwa RNPK juga melibatkan seluruh dinas pendidikan di Indonesia, para ahli pendidikan dan masyarakat. Untuk itu dia sangat optimistis RNPK akan mampu merumuskan solusi konkret bagi permasalahan guru di Indonesia.

RNPK berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 11 hingga 14 Februari 2019, di kantor Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. RNPK dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, pada Selasa (12/2/2019).

Pentingnya Kemampuan Pedagogi bagi Guru

Supriano menjelaskan, jika guru memiliki kemampuan pedagogi yang baik maka pembelajaran di kelas akan lebih menyenangkan. Sehingga siswa juga akan lebih aktif, proses pembelajaran lebih hidup dan terjalin komunikasi dua arah.

"Jangan sampai guru yang dominan, mengajar satu arah. Karena kalau begitu siswa tidak akan kreatif, jadilah siswa yang pasif," kata dia.

Peningkatan pedagogi guru juga diperlukan agar siswa siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Karena di era teknologi digital, siswa harus lebih kreatif, inovatif dan kompeten.

**RNPK 2019
DIHARAPKAN
MAMPU
TUNTASKAN
PERSOALAN
GURU**



Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPBK) 2019 di Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

PEMERINTAH SEMAKIN FOKUS MEMBANGUN SDM

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan, fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi generasi muda, khususnya dalam menyambut bonus demografi dan persaingan yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi pembangunan manusia.

“Kita ingin pendidikan yang fokus pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting,” pesan Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPBK) 2019 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2/2019).

Kembali disampaikan oleh Presiden bahwa kunci bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri dalam memenangkan persaingan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Selain infrastruktur yang telah dibangun dalam empat tahun terakhir, peningkatan kualitas manusia menjadi prasyarat agar Indonesia tidak terjebak dalam

perangkap pendapatan menengah (middle income trap).

“Apabila kita bisa meng-upgrade secepat-cepatnya sehingga levelnya melebihi negara-negara di kanan-kiri kita, itulah namanya kemenangan kita dalam bersaing,” ujarnya.

Presiden berharap semakin banyak guru sekolah menengah kejuruan (SMK) yang terampil dalam membimbing siswanya agar memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang baik. “Guru yang terampil harus lebih banyak dari guru normatif. Informasi yang saya terima, guru normatif itu persentasenya lebih banyak,” katanya.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan jumlah guru kejuruan produktif. Guru-guru SMK akan diperkuat melalui program keahlian ganda. Hal ini untuk mendorong revitalisasi vokasi secara keseluruhan dan dapat menghasilkan lulusan yang bisa bersaing di dunia kerja.

“Target guru berkeahlian ganda pada 2019 ini mencapai 40 ribu

guru,” kata Mendikbud.

Program keahlian ganda merupakan pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru SMK kategori normatif dan adaptif. Sebanyak 51 sasaran keahlian diklat keahlian ganda dikelompokkan ke dalam enam bidang, di antaranya kelautan, agrobisnis dan agroteknologi, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi dan rekayasa, dan teknologi informasi serta komunikasi.

Revolusi Industri 4.0 dan Upaya Menghasilkan Guru Terampil

Untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju, Presiden Joko Widodo ingin tahun 2019 ini fokus pada pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam arahnya saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPBK) 2019, Presiden Joko Widodo meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus meningkatkan pendidikan vokasi.

Presiden juga menekankan pentingnya penambahan jumlah

guru terampil agar sejalan dengan fokus pemerintah untuk membangun SDM. Pemerintah ingin SDM Indonesia memiliki keahlian serta keterampilan agar mampu bersaing dengan negara lain.

“Kita juga harus mengenalkan kepada anak di mana ini sudah zamannya revolusi industri 4.0. Kita harus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan digitalisasi, bahasa coding, dan ke depan hal itu sangat penting sekali, mulai dikenalkan karena ini kesempatan, apalagi kalau kita bisa melompati negara lain, inilah kesempatan kita,” kata Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, pada Selasa (12/2/2019)

Mengenai permintaan yang disampaikan Presiden Jokowi tentang upgrade guru produktif, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud, Supriano mengatakan Kemendikbud akan terus melakukan upaya upgrading, salah satunya bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sehingga menghasilkan guru terampil.

“Kita sudah mulai bekerja sama dengan dunia industri. Karena sebagaimana yang kita lihat, kecepatan dan kebutuhan jika bekerja sama dengan industri maka akan fokus kepada tenaga guru produktif mana yang dibutuhkan, dan akan terserap di lapangan, sehingga anak-anak SMK akan dapat terjun langsung ke lapangan,” ujar Supriano.

RNPK 2019 HASILKAN REKOMENDASI MENGUATKAN PENDIDIKAN DAN MEMAJUKAN KEBUDAYAAN



Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi ditutup pada Rabu (13/2/2019). Perhelatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ini menghasilkan lima kelompok rekomendasi. “Kita sudah mendengarkan seluruh rekomendasi dari kelima kelompok. Usulan yang diajukan sangat beragam, ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang berupa usulan program dan kegiatan, banyak juga yang berupa usulan regulasi. Dan yang pasti ada yang menjadi tanggung jawab pusat, ada yang menjadi tanggung jawab daerah, dan ada juga yang menjadi tanggung bersama,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, saat menutup RNPK 2019, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdiklat) Kemendikbud, di Bojongsari, Depok, Rabu (13/2/2019).

Terkait rekomendasi itu, Menteri Muhadjir menghimbau agar tetap menjalin dan meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Dari diskusi yang dilakukan jelas masih banyak pekerjaan rumah kita bersama. Kemendikbud tentu saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut secara

sendiri, dan karena itu memerlukan dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Rekomendasi Kelompok I dengan topik Penataan dan Pangkatan Guru, terbagi ke dalam tiga sub topik yaitu akselerasi proses redistribusi guru, peningkatan profesionalisme guru, dan penerapan tunjangan guru berbasis kinerja. Sebanyak sembilan rekomendasi yang dihasilkan, yaitu:

1. Redistribusi guru dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis setiap daerah;
2. Pembukaan formasi CPNS untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah;
3. Pangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Belajar Guru di daerah melalui berbagai moda terutama melalui teknologi pembelajaran digital;
5. Pengembangan komunitas pegiat guru menjadi organisasi



6. Penyesuaian kurikulum LPTK agar dapat melahirkan guru yang kompeten, siap mengajar, menjadi pembelajar sepanjang hayat, sehingga memiliki kompetensi profesional yang memadai sebagai pendidik;
7. Pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung berdasarkan jumlah jam mengajar dengan baseline 24 jam per minggu;
8. Sertifikat profesi guru akan dievaluasi secara berkala dan diusulkan agar berlaku selama lima tahun;
9. Daftar hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik dipergunakan sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja guru yang disesuaikan dengan kondisi setiap daerah.

Kelompok II dengan topik sistem zonasi pendidikan yang terbagi ke dalam sub topik Perluasan Akses Pendidikan, Percepatan Pemerataan Kualitas Pendidikan, dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan. Sebanyak enam rekomendasi yang dihasilkan oleh kelompok ini, sebagai berikut:

1. Diperlukan pemahaman tujuan dan strategi yang sama tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
2. Diperlukan kesepakatan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Kesepakatan ini untuk tata kelola berbasis zonasi, dan pengintegrasian data kependudukan melalui NIK dengan data siswa melalui NISN dalam rangka optimalisasi sistem zonasi;
3. Pelaksanaan PPDB harus ditempuh dengan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (sebesar 90%), jalur prestasi (5%) dan jalur perpindahan orang tua (5%). Jalur ini mendukung faktor-faktor tertentu dari peserta didik yaitu perkembangan anak sesuai dengan usianya, kondisi dan peran serta orang tua, dan prestasi siswa untuk membuka ruang anak saling berkompetisi secara akademik;

4. Sejalan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan: Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona; Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona; Pemenuhan dan perbaikan sarana prasarana sekolah; dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah Daerah;
5. Dalam rangka pemetaan mutu pendidikan, baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat harus memiliki informasi valid terkait data pemetaan mutu agar tindak lanjut untuk pemerataan kualitas pendidikan dari pemetaan tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan terpantau;
6. Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD (non-transfer daerah) yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan mutu pendidikan serta memberikan bantuan afirmasi bagi peserta didik yang tidak mampu.

Kelompok III dengan topik Revitalisasi Vokasi, terbagi ke dalam tiga sub topik, yaitu pengembangan sertifikasi kompetensi, penguatan kerja sama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI), penguatan kewirausahaan (entrepreneurship), penuntasan peta jalan revitalisasi vokasi provinsi. Kelompok ini menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

1. Penuntasan kekurangan lisensi untuk skema sesuai kompetensi keahlian pada 840 LSP-P1 SMK terlisensi oleh BNSP pada tahun 2019 dan penambahan 360 LSP-P1 SMK terlisensi baru oleh BNSP; (2) Harmonisasi sistem sertifikasi BNSP dengan DUDI untuk pengakuan sertifikasi;
2. Harmonisasi sistem sertifikasi antara SMK, SMA-LB, Paket C Vokasi, serta lembaga kursus dan pelatihan;
3. Perluasan jejaring kerja LSP-P1 SMK dengan SMK yang memiliki kompetensi keahlian sejenis;
4. Sinkronisasi sertifikasi uji kompetensi untuk lembaga pendidikan formal dan nonformal melalui Komite

- Nasional Kualifikasi Indonesia;
5. Pemenuhan jumlah dan kualitas asesor dan Tempat Uji Kompetensi (TUK);
 6. Integrasi sistem informasi LSP; Mempercepat terbitnya peraturan tentang insentif bagi DUDI yang membantu pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 7. Mendorong instruktur dari industri ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi;
 8. Realisasi program usulan dari DUDI tentang pemanfaatan tenaga kerja pensiun dari DUDI sebagai instruktur SMK, dan parent company;
 9. Mendorong pendirian kelas industri;
 10. Membuat payung hukum agar setiap perusahaan dapat memberikan CSR kepada lembaga pendidikan (SMK atau lembaga kursus) dari keuntungan perusahaan;
 11. Mendorong SMK menjadi sekolah pencetak wirausaha;
 12. Memantapkan core skills dalam kurikulum SMK dan kursus dalam bidang kewirausahaan antara lain literasi dasar, kemampuan analisis berbagai informasi, strategi bisnis, keberanian menangkap peluang bisnis;
 13. Mengembangkan program inkubasi bisnis untuk melahirkan wirausahawan baru melalui pembinaan kreativitas dan pengembangan ide baru yang inovatif baik secara mandiri maupun kerja sama secara sistematis dengan DUDI;
 14. Meningkatkan kapabilitas guru/instruktur dalam kewirausahaan dan guru tamu dari kalangan wirausaha;
 15. Memfasilitasi peserta didik calon wirausahawan untuk mendapatkan permodalan, jejaring usaha, pemasaran dari lembaga keuangan, donor, industri, UMKM;
 16. Mengoptimalkan dan mensinergikan peran Pemerintah, pemerintah provinsi dan kab/kota, sekolah dan DUDI dalam pengembangan kewirausahaan;
 17. Menuntaskan Peraturan Mendikbud tentang pembukaan, peralihan, dan penutupan SMA dan SMK;
 18. Mendorong provinsi melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasinya serta mengembangkan SMK unggulan sesuai potensi wilayah masing-masing;
 19. Mendorong provinsi untuk membentuk tim revitalisasi pendidikan vokasi yang beranggotakan OPD terkait, DUDI, perguruan tinggi, dan organisasi profesi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi;
 20. Mendorong seluruh provinsi untuk menuntaskan Peta Jalan Revitalisasi Vokasi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur pada tahun 2019;
 21. Mendorong provinsi untuk menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana SMK yang memadai dan berkualitas sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK.

Kelompok IV dengan topik Pemajuan Kebudayaan, terbagi ke dalam sub topik merawat persatuan, toleransi dan kebhinekaan, dan tata kelola pemajuan kebudayaan. Kelompok ini menghasilkan rekomendasi, sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota segera menerbitkan regulasi turunan dari UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dengan ruang lingkup: (a) Aspek kelembagaan terkait dengan entitas tunggal kebudayaan di tingkat

- kementerian, dinas provinsi/kabupaten/kota; (b) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan, serta pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian; (c) Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD, atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK); (d) Menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk berbagai profesi di bidang Kebudayaan;
2. Mengonsolidasikan program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator;
3. Memperkuat pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui dewan kesenian, dewan kebudayaan, majelis adat, komunitas, dan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik;
4. Mewujudkan Pekan Kebudayaan Nasional, Indonesiana, Youth Camp, dan Seniman Masuk Sekolah sebagai program prioritas dalam memperkuat ekosistem kebudayaan untuk merawat Persatuan, Toleransi, dan Kebhinekaan.

Kelompok V dengan topik Penguatan Sistem Perbukuan dan Gerakan Literasi dengan sub topik penyediaan buku di seluruh wilayah Indonesia, penguatan gerakan literasi nasional, pelestarian bahasa daerah. Rekomendasi kelompok ini, terdiri atas:

1. Penyediaan buku bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T dengan berbagai strategi dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
2. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan buku bermutu, murah, dan merata di daerahnya;
3. Penguatan sepuluh (10) unsur pelaku perbukuan untuk mengoptimalkan ekosistem perbukuan;
4. Penguatan tata kelola sistem informasi perbukuan;
5. Perlunya penguatan regulasi mengenai gerakan literasi;
6. Perlunya kebijakan tentang pengaturan penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat dan lembaga sejenis;
7. Perlunya mekanisme pengiriman donasi buku untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengadaan dan pemerataan buku di Taman Bacaan Masyarakat, perpustakaan desa dan sekolah, serta lembaga sejenis;
8. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memperkuat gerakan literasi;
9. Perlunya setiap daerah menetapkan regulasi tentang pelestarian bahasa daerah dan pengutamaan bahasa negara (bahasa Indonesia);
10. Perlunya model pelestarian bahasa daerah yang dapat diimplementasikan baik melalui jalur sekolah (muatan lokal) maupun nonsekolah (berbasis komunitas);
11. Perlu pendayagunaan kekhasan lokal yang terkandung dalam bahasa daerah untuk mengungkap konsep baru.

Belajar dari Praktik Baik Penataan Guru di Tulang Bawang Barat

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat menjadi ajang berbagi praktik baik. Salah satunya praktik baik yang dilakukan di Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung.

Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung, Umar Ahmad sebagai salah satu pembicara di RNPK 2019 mengatakan bahwa dirinya berusaha untuk melakukan penataan guru di wilayahnya. "Jika daerah lain melakukan penataan guru karena ada surplus, maka kami melakukannya karena kurang

guru," ujar Umar di sela-sela penyelenggaraan RNPK 2019.

Menurut Umar, pemerintah daerah tidak bisa begitu saja mengabaikan apabila terjadi masalah kekurangan guru di daerahnya. Harus ada upaya nyata untuk mengatasi hal tersebut demi mewujudkan generasi penerus yang berkualitas. "Kami ada program namanya "Tubaba Cerdas", di mana kami merekrut 13 orang guru dari seluruh Indonesia. Pembiayaan 12 orang guru bersumber dari APBD sedangkan untuk 1 orang lainnya bersumber dari partisipasi masyarakat. Mereka didatangkan untuk kemajuan pendidikan di Tubaba," terang Umar.

Ditambahkan Umar, untuk mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas, pandai saja tidak cukup jika tanpa disertai dengan budi pekerti. Masyarakat Tubaba, menurut Umar, sejak dulu sudah memegang teguh prinsip nenen, nedes dan nerimo (kerja keras, pantang menyerah, dan ikhlas). "Dalam rangka mencapai nilai nilai yang disebutkan tadi itu, kami juga merekrut 172 orang guru penggerak yang diangkat murni dari APBD. Sekarang para guru penggerak tersebut sedang dilatih oleh TNI AU dan Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung (Wanadri) dan mereka selama setahun ke depan akan kami tugaskan ke sekolah-sekolah," pungkas Umar.

Tugas dari guru penggerak ini, lanjut Umar, utamanya adalah untuk memastikan agar modul pendidikan karakter yang sedang dibuat bisa berjalan di sekolah-sekolah. "Perlu saya sampaikan, kami sedang membuat modul untuk pembiasaan bagi peserta didik SD. Selain itu, juga ada modul untuk keteladanan bagi guru serta orang tua," kata Umar.

Modul ini diharapkan dapat menjadi pembiasaan bagi para siswa, misalnya bagaimana siswa membawa botol minuman setiap hari ke sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan sebagainya. Sehingga pembiasaan ini bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter siswa.



MENGENAL PARADIGMA PEMBINAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan didasarkan pada beberapa paradigma. Sebagian paradigma bersifat universal, dikenal dan dipakai berbagai bangsa, dan sebagian lagi lebih bersifat nasional sesuai dengan nilai-nilai dan kondisi bangsa Indonesia. Mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kemendikbud, Renstra Ditjen GTK Tahun 2015—2019 disusun berdasarkan paradigma sebagai berikut:

1. Pendidikan untuk Semua

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” adalah amanat konstitusi. Memenuhi amanat konstitusi tersebut, Ditjen GTK memiliki peran untuk memenuhi hak guru dalam mengembangkan diri dan mendapat manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat diakses oleh setiap guru. Peran penting Ditjen GTK tersebut adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier guru dan tenaga kependidikan tanpa membedakan status ekonomi, kondisi fisik/mental, asal wilayah, gender dan agama dalam rangka mendukung terselenggaranya pendidikan untuk semua.

2. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, yaitu



sejak lahir hingga akhir hayat. Pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Untuk mendukung proses pendidikan tersebut, peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan diselenggarakan dengan sistem terbuka yang dapat diakses oleh semua guru dan tenaga kependidikan merupakan bagian dari tugas Ditjen GTK antara lain berupa penyiapan sistem pengembangan keprofesian berkelanjutan yang memungkinkan guru dan tenaga kependidikan untuk terus belajar sepanjang hayatnya.

3. Pendidikan sebagai Suatu Gerakan

Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya bagi semua warga negara. Namun, semua pihak dapat memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan agar hasilnya optimal. Penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Untuk mendukung pendidikan sebagai suatu gerakan, maka Ditjen GTK berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan sebagai motor penggerak peningkatan mutu pendidikan.

4. Pendidikan Menghasilkan Pembelajar

Penyelenggaraan pendidikan harus memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif dan inovatif. Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik. Untuk menghasilkan pembelajar, maka Ditjen GTK berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan untuk selalu meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi yang dapat memotivasi anak didik menjadi insan pembelajar.

5. Pendidikan Membentuk Karakter

Pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian dengan karakter unggul yang antara lain: bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Untuk mewujudkan kesemuanya itu, Ditjen GTK berperan dalam penguatan guru sebagai role model dalam membentuk watak dan mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik, melalui keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.

6. Sekolah yang Menyenangkan

Sekolah sebagai satuan pendidikan yang utama merupakan suatu ekosistem. Suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Untuk mewujudkan fungsi sekolah tersebut, Ditjen GTK berperan mendorong Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi motor penggerak untuk mewujudkan sekolah yang kondusif melalui penguatan peran kepala sekolah yang memimpin para pelaku pendidikan untuk membuat sekolah yang efektif.

7. Pendidikan Membangun Kebudayaan

Pendidikan memiliki hubungan yang amat erat dengan kebudayaan. Sebagian dari paradigma yang disebut di atas mengandung aspek kebudayaan atau proses budaya. Pendidikan pada dasarnya juga merupakan proses membangun kebudayaan atau membentuk peradaban. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen GTK berperan mendorong guru dan tenaga kependidikan membangun budaya kerja sesuai standar kinerja yang diharapkan.

Mengenal Sertifikasi Guru

Guru merupakan sebuah profesi seperti profesi lain: dokter, akuntan, pengacara, sehingga proses pembuktian profesionalitas perlu dilakukan. Seseorang yang akan menjadi akuntan harus mengikuti pendidikan profesi akuntan terlebih dahulu. Begitu pula untuk profesi guru harus melalui sertifikasi guru untuk membuktikan seseorang layak menduduki profesi guru tersebut.

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang menyatakannya adalah Pasal

8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal lainnya adalah Pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa sertifikat pendidik sebagaimana dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007. Selanjutnya

ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Sertifikasi Guru bagi Guru dalam Jabatan.

Ada pun yang melaksanakan sertifikasi guru jika merujuk pada UUGD Pasal 11 ayat (2) dinyatakan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah. Dengan demikian sertifikasi guru diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi.



